



KAB. PINRANG

RENCANA KERJA

RENJA 2026

**DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA
DAN TATA RUANG**

TAHUN 2025





**BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 23 TAHUN 2025**

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pinrang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7081);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Bupati adalah Bupati Pinrang.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, KeBUCamatan dan Kelurahan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 5 (lima) Tahun yakni tahun 2025 - 2029.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi rencana penfapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.



Pasal 2

Renja PD Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Pembangunan 1 (satu) tahun Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja anggaran PD Tahun 2026.

Pasal 3

Renja-PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. pendahuluan;
- b. hasil evaluasi rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. penutup.

Pasal 4

Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas Renja :

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
- d. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Dinas Sosial;
- h. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;
- i. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- j. Dinas Ketahanan Pangan
- k. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup;
- l. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
- m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
- n. Dinas Perhubungan dan Pertanahan;
- o. Dinas Komunikasi, Infomatika dan Persandian;
- p. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- q. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- r. Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga;
- s. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan;
- t. Dinas Perikanan;
- u. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- v. Dinas Peternakan Dan Perkebunan;
- w. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
- x. Sekretariat Daerah;
- y. Sekretariat DPRD;
- z. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- aa. Inspektorat;
- bb. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- cc. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

- dd. Badan Kesatuan Bangsa Politik;
- ee. Kecamatan Watang Sawitto;
- ff. Kecamatan Paleteng;
- gg. Kecamatan Tiroang;
- hh. Kecamatan Mattiro Bulu;
- ii. Kecamatan Suppa;
- jj. Kecamatan Mattiro Sompe;
- kk. Kecamatan Lanrisang;
- ll. Kecamatan Patampanua;
- mm. Kecamatan Duampanua;
- nn. Kecamatan Batulappa;
- oo. Kecamatan Cempa; dan
- pp. Kecamatan Lembang;

Pasal 5

Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 21 Oktober 2025



Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 21 Oktober 2025



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

CALO HERRANG

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2025 NOMOR 25

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT untuk segala petunjuk dan hidayahnya atas terselesaikannya penyusunan Rencana Awal Rencana Kerja (RENJA) Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang Tahun 2026. Penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten tahun 2026.

Dokumen Rencana Kerja Tahun 2026 memuat kebijakan, program, dan kegiatan dengan perencanaan sumberdaya yang dimiliki untuk memenuhi target kinerja dinas. Hal ini diharapkan menjadi pedoman dan acuan bagi aparatur Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang dalam menyusun Program Kegiatan prioritas pada tahun 2026 dengan memenuhi target dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja ini.

Dengan memohon Rahmat dan Ridho Allah Subhana Wata'ala serta segala upaya dari segenap Aparat dalam lingkup Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang, kami berharap agar semua target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2026 tercapai serta dapat meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur daerah guna mewujudkan Kabupaten Pinrang yang lebih baik

Pinrang, 27 Oktober 2025

**Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya,
Dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang**



AWALUDDIN MARAMAT, S.STP.,M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19800701 200012 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	I
Daftar Isi.....	II
Daftar Tabel.....	III
Daftar Gambar.....	IV
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	6
1.3. Maksud dan Tujuan	12
1.4. Sistematika Penulisan	13
Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	14
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	14
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	31
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	46
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	50
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	72
Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	81
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	81
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	84
3.3. Program dan Kegiatan	85
Bab IV RENCANA KERJA DAN KEGIATAN	104
4.1. Program dan Kegiatan	104
Bab V PENUTUP.....	130
5.1. Catatan Penting yang Perlu mendapat Perhatian	130
5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan	130
5.3. Rencana Tindak Lanjut	131

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2025 Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pinrang	16
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang	32
Tabel 2.3. Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap jumlah Rumah Tangga di seluruh Kabupaten Pinrang Tahun 2024	41
Tabel 2.4. Pemetaan Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	47
Tabel 2.5. Identifikasi Isu Kesenjangan dan Ketidakadilan Gender dalam Pembangunan Infrastruktur	48
Tabel 2.6. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang	51
Tabel 2.7. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang	73
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pinrang Tahun 2026	84
Tabel 3.2. Strategi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Masa Jabatan tahun 2025-2029	87
Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027	91
Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pinrang Tahun 2026	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Keterkaitan Renja, Renstra dan Dokumen Lainnya	6
--	---

BAB I

Pendahuluan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan Pembangunan daerah sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dan Peraturan Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, maka setiap PD (Perangkat Daerah) menyusun Renja PD dengan mengacu pada rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah), Renstra PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya serta masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan Organisasi

Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun dan berpedoman pada RENSTRA PD dan RKPD.

Rencana Kerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang memuat bahan usulan kegiatan yang dibahas pada forum Perangkat Daerah (PD) dan pelaksanaan musrenbang Kabupaten Pinrang Tahun 2026. Hasil dari musrenbang tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2026.

Program Kegiatan Rencana Kerja ini juga memperhatikan permasalahan isu gender, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, yang mengharuskan semua instansi pemerintah di tingkat nasional dan daerah, untuk mengarusutamakan gender ke dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi seluruh kebijakan dan program juga adanya Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan. Pengarusutamaan gender merupakan suatu strategi pembangunan untuk mencapai kesetaraan gender (KG), yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas seluruh kebijakan, program dan kegiatan di berbagai bidang pembangunan (Inpres 9/2000). Pengarusutamaan Gender dalam penyelenggaraan infrastruktur PUPR merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan

pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang memperhatikan kualitas hidup, pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan (termasuk orang lanjut usia, pemuda, anak-anak, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, serta kelompok rentan lainnya) yang diperoleh dari kesetaraan akses, kontrol, partisipasi dalam pembangunan dalam memperoleh manfaat hasil-hasil pembangunan. Tujuan umum dari pelaksanaan PUG-PUPR untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang PU telah responsif gender yang artinya tidak ada lagi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mendapatkan manfaat dari hasil-hasil pembangunan infrastruktur serta dalam meningkatkan partisipasi dan ikut mengontrol proses pembangunan infrastruktur.

Kegiatan pembangunan infrastruktur yang terdapat di Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang terkait pengarusutamaan gender adalah kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah serta Penyelenggaraan Jalan di Kabupaten Pinrang. Berdasarkan data tahun 2024 capaian air minum aman masih rendah sekitar 27,87% dengan jumlah rumah tangga terlayani jaringan perpipaan aman sekitar 5,80% atau sekitar 5.339 SR. Sedangkan capaian sanitasi aman hanya sekitar 2,66%. Untuk penyelenggaraan jalan capaian tahun 2024 untuk jalan kondisi mantap sekitar 68,54% atau sekitar 448,15 Km dari jumlah panjang jalan kabupaten 653,83 Km. Dari data tersebut menunjukkan bahwa untuk meningkatkan akses air minum aman dan sanitasi aman serta peningkatan infrastruktur jalan diperlukan sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur yang inklusif, melakukan edukasi dan pembinaan kepada masyarakat tentang kebersihan dan

sanitasi, mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pemeliharaan sistem air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan serta penyelenggaraan jalan kabupaten.

1.1.1. Pengertian Renja PD

Rencana kerja (Renja) PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja PD

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang merupakan Dokumen Perencanaan secara menyeluruh yang dibuat setiap tahunnya dengan data yang didapatkan dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten yang mengacu kepada Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah (Renstra PD) sesuai dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

1.1.3. Keterkaitan antara Renja PD dengan Renstra PD dan RKPD Kab. Pinrang 2026

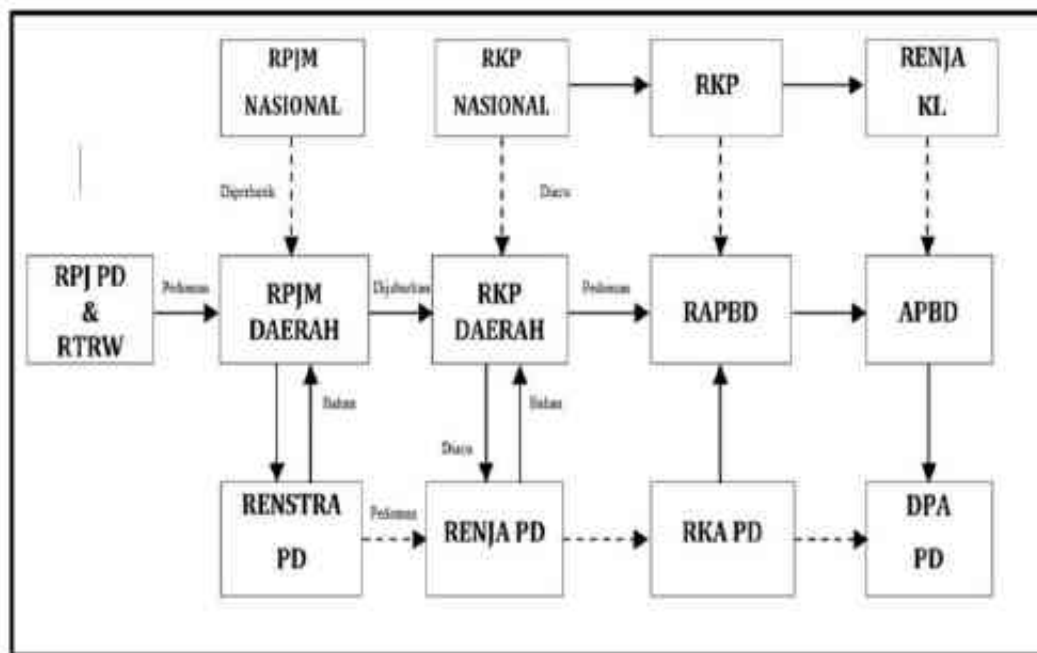
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang merupakan Dokumen Perencanaan secara menyeluruh yang dibuat setiap tahunnya dengan data yang didapatkan dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten yang mengacu kepada Rencana

Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sesuai dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam rangka penyusunan renja perangkat daerah, perangkat daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPELITBANGDA dan pemangku kepentingan. Renja perangkat daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan Rancangan Awal;
- c. penyusunan Rancangan;
- d. pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Keterkaitan antara Rencana Kerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pinrang dengan RKPD, Rencana Strategis dan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Keterkaitan Renja, Renstra dan Dokumen Lainnya

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pinrang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta landasan hukum bersifat operasional yang mendukung arah kebijakan Rencana Strategis Dinas, meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190);Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
20. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

21. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Numenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024;
31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri 900-1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889-Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 286);
35. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 62); Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2022–2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 Nomor 3);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan;(Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 10)
37. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2022–2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 Nomor 3);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2024 Nomor 7);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
40. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang;
41. Peraturan Bupati Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2024 Nomor 2);
42. Peraturan Bupati Kabupaten Pinrang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2025-2026
43. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
44. Peraturan Bupati Kabupaten Pinrang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Mengacu pada hal diatas maka beberapa komponen yang dianggap mendukung adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dibidangnya.

2. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung.
3. Pendanaan baik yang bersumber dari APBD II, APBD I dan APBN.

Penyusunan program berdasarkan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan pertimbangan kemampuan keuangan dan tingkat kebutuhan yang ada di Kabupaten Pinrang dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Renja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan kerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang Tahun 2026 yang mendukung atau mewujudkan visi misi Bupati Tahun 2025-2029 juga menjadi masukan utama dan mendasar bagi perencanaan diperingkat yang lebih atas seperti Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Renstra OPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bahkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

b. Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang 2026 bertujuan merumuskan gambaran kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang yang akan dicapai selama periode 1 (satu) tahun beserta yang lebih konkrit mengenai daftar program, kegiatan dan pagu indikatif Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang serta sumber pendanaannya sesuai dengan PERMENDAGRI No. 13/2006.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

- 5.1 Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian
- 5.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan
- 5.3 Rencana Tindak lanjut

BAB II
Hasil Evaluasi Renja
Perangkat Daerah Tahun 2024

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN PINRANG TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) suatu OPD adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis OPD yang akan dilaksanakan. Dalam dokumen Rencana Kerja, tertuang tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program dan kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas.

Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Dalam konsep ini diperlukan indikator *Input* (masukan) *output* (keluaran) dan *outcome* (hasil). Secara rinci indikator-indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Indikator Masukan (*Input*), yaitu indikator yang menggambarkan segala sesuatu yang dibutuhkan, baik berupa sumber dana, sumber daya alam, sumber daya manusia maupun berupa

teknologi dan informasi, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.

2. Indikator keluaran (*Output*), yaitu indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
3. Indikator hasil (*Outcome*), yaitu indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

Suatu kegiatan dinilai ekonomis bila sumber daya alam yang digunakan sebaik-baiknya sebagai input kegiatan. Penggunaan input sebaiknya untuk mendapatkan output secara maksimal dinamakan efisien dan seberapa besar output akan menghasilkan outcome dinamakan efektif. Penilaian seberapa besar nilai ekonomis dan nilai efisien suatu kegiatan dapat dilihat secara langsung atau jangka pendek, karena output merupakan hasil langsung dari suatu kegiatan, namun sulit untuk menilai seberapa efektif suatu kegiatan karena efektifitas baru dapat dinilai pada jangka menengah yang membutuhkan beberapa tahun penelitian/penilaian. Tabel 2.1 menyajikan review hasil rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang Tahun 2024, dan realisasi Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan atau realisasi APBD, sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2024 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang

No	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan (2025)		Ket
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan penunjang layanan kegiatan perkantoran yang terpenuhi	99,88%	96,48%	99,88%	96,92%	97,04%	99,88%	97,76%	97,88%	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan dan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang berkualitas dan tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	2	3	3	100,00	3	8	88,89	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	1	1	1	100,00	1	3	75,00	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)	Ket
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	4	1	1	1	100,00	1	3	75,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	4	1	1	1	100,00	1	3	75,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4	1	1	1	100,00	1	3	75,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	34	5	5	5	100,00	6	16	47,06	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43	5	11	11	100,00	14	30	69,77	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase serapan anggaran secara tepat waktu dan sesuai aturan	98,00%	99,62%	99,00%	97,98%	98,97%	97,50%	98,37%	100,37%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	286	71	71	71	100,00	72	214	74,83	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	41	12	12	12	100,00	12	36	87,80	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	48	12	12	12	100,00	12	36	75,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	4	1	1	1	100,00	1	3	75,00	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)	Ket
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	57	12	12	12	100,00	14	38	66,67	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang tercatat dalam daftar pengguna barang	100,00%	99,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,67%	99,67%	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	14	4	4	4	100,00	4	12	85,71	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8	2	2	2	100,00	2	6	75,00	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pendapatan Daerah Kewenangan Pemerintah Daerah	97,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,64%	32,55%	33,27%	
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	28	0	0	0	0	14	14	50,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Aparatur yang mencapai nilai SKP Baik	100,00%	99,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,67%	99,67%	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	12	4	0	1	100,00	0	5	41,67	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	41	5	12	5	41,67	12	22	53,66	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	111	9	18	45	250,00	18	72	64,86	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan layanan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100,00%	99,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,67%	99,67%	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)	Ket
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	8	2	2	1	50,00	2	5	62,50	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6	1	1	1	100,00	2	4	66,67	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12	0	4	4	100,00	4	8	66,67	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	32	20	20	12	60,00	0	32	100,00	
	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah paket bahan / material sesuai kebutuhan	9	1	1	1	100,00	2	4	44,44	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	400	94	118	118	100,00	94	306	76,50	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	6	1	1	1	100,00	2	4	66,67	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	100,00%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	98,33%	98,33%	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	17	3	4	0	0,00	6	9	52,94	
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	16	4	0	0	0,00	0	4	25,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	47	3	34	34	100,00	5	42	89,36	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	7	2	3	3	100,00	2	7	100,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)	Ket
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	48	12	12	12	100,00	12	36	75,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	48	12	12	12	100,00	12	36	75,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100,00%	99,85%	100,00%	99,85%	99,85%	100,00%	99,90%	99,90%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	273	32	36	32	88,89	105	169	61,90	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	427	95	95	122	128,42	105	322	75,41	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/terehabilitasi	14	4	4	4	100,00	4	12	85,71	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	14	4	2	4	200,00	4	12	85,71	
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	100,00%	96,33%	100,00%	96,88%	96,88%	100,00%	97,74%	97,74%	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	100,00%	96,33%	100,00%	96,88%	96,88%	100,00%	97,74%	97,74%	
		Presentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	2,62%	2,42%	2,60%	2,75%	105,77%	2,61%	2,59%	98,98%	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)	Ket
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1580	480	400	240	60,00	300	1020	64,56	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	4	1	1	1	100,00	1	3	75,00	
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	9,98	1,24	2,74	3	109,49	3	7,24	72,55	
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Jaringan Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	500	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase TPA Regional yang di Bangun sesuai Kriteria Pengelolaan Persampahan Regional	20,83%	0%	0%	0%	0%	20,83%	6,94%	33,33%	
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Luas Lahan TPA Regional sesuai kriteria pengelolaan persampahan regional	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	41,67%	33,33%	
	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang disediakan	2	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100,00%	98,45%	99,99%	98,63%	98,64%	100,00%	99,03%	99,03%	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rumah tinggal bersanitasi	100,00%	98,45%	99,99%	98,63%	98,64%	100,00%	99,03%	99,03%	
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	98,73%	98,59%	98,60%	98,63%	100,03%	98,69%	98,64%	99,91%	
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	84,81%	83,83%	84,00%	84,36%	100,43%	84,65%	84,28%	99,38%	
		Persentase rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	3,03%	2,90%	2,90%	2,33%	80,34%	3,00%	2,74%	90,54%	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)	Ket
	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalkan	5	0	0	0	0,00	1	1	20,00	
	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah rumah tangga yang terlayani jasa penyedotan lumpur tunja	300	0	0	0	0,00	150	150	50,00	
	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Jumlah desa yang dibina dalam pengembangan sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	10	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang dikembangkan kapasitasnya	10	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang dioperasikan dan terpelihara	16	4	4	4	100,00	0	8	50,00	
	Penyediaan Sub Sistem Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik sesuai dengan standar	500	0	100	100	100,00	0	100	20,00	
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	150	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	4	1	1	1	100,00	0	2	50,00	
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	25,00%	20,81%	22,42%	22,42%	100,00%	23,71%	22,31%	89,25%	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Daerah yang Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	60,00%	20,00%	30,00%	36,00%	120,00%	50,00%	35,33%	58,89%	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)	Ket
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	2000	0	0	0	0	1000	1000	50,00	
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang beroperasi dan dipelihara	600	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Optimalisasi Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang dioptimalisasi	100	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan yang disediakan	1	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	1	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang disediakan	2	0	0	0	0	1	1	50,00	
	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang direhabilitasi	5	2	1	2	200,00	1	5	100,00	
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang dibangun	22	8	10	2	20,00	1	11	50,00	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	1	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	2	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Program Pengembangan Permukiman	Rasio infrastruktur permukiman di kawasan strategis daerah	0,09	0,06	0,09	0,09	100,00%	0,09	0,08	88,89%	
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase permukiman di kawasan strategis daerah yang telah tertata	15,63%	10,94%	15,63%	14,06%	89,96%	15,63%	13,54%	86,65%	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)	Ket
	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	20	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang Diadakan	1	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Peningkatan TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang ditingkatkan	5	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	0	0	1	1	100,00	0	1	0,00	
	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	0	0	1	1	100,00	0	1	0,00	
	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	1	1	1	0	0,00	0	1	100,00	
	Optimalisasi TPST di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah TPST di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	1	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik sesuai dengan standar	20	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten/Kota	1	0,73	0,75	0,73	97,33%	0,74	0,73	73,33%	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)	Ket
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	0,74	0,73	0,74	0,72	97,16%	0,74	0,73	98,60%	
	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)	200	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2	0	0	0	0,00	1	1	50,00	
	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi, Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Penilai Teknis (TPT) Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi, Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Penilai Teknis (TPT) Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	700	154	250	176	70,40	100	430	61,43	
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rasio penataan bangunan dan lingkungannya di daerah	0,0013	0,0004	0,00189	0,00189	100	0,0013	0,0012	92,05%	
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase bangunan dan lingkungannya yang tertata di Daerah	6%	2,00%	80,70%	2,00%	2,47%	6,00%	3,33%	55,56%	
	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Teknis Sistem Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan (Dokumen)	100	0	0	0	0,00	0	0	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)	Ket
	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang ditata	10	0	2	2	100,00	4	6	60,00	
	Penyusunan Rencana dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan yang disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5	2	0	0	0	0	2	40,00	
	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	70,02%	67,72%	73,10%	68,54%	93,76%	69,25%	68,50%	97,83%	
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Rasio panjang jalan dengan dengan jumlah penduduk	0,00141	0,00156	0,00155	0,00156	100,65%	0,00146	0,00153	108,27%	
		Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	0%	1,83%	2%	1,83%	100,00%	0%	1,22%	0,00%	
		Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	63,78%	53,07%	56,13%	55,79%	99,39%	59,95%	56,27%	88,23%	
	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang dikelola	4	1	1	2	200,00	1	4	100,00	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan yang disusun	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00	
	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun (Km)	109,03	66,96	15	8,2	54,67	4,7	79,86	73,25	
	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang direkonstruksi (Km)	88,5	39,71	6,5	2,4	36,92	8,3	50,405	56,95	
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dipelihara secara berkala (Km)	26,97	9,498	0,85	1,5	176,47	0,3	11,298	41,89	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)	Ket
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin (Km)	48,09	31,05	4	5,2	130,00	3	39,25	81,62	
	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	12	3	3	3	100,00	3	9	75,00	
	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi	27	16	4	4	100,00	3	23	85,19	
	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara secara berkala	10	0	0	0	0,00	5	5	50,00	
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase kebijakan penataan ruang yang diterbitkan sesuai aturan	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	100,00%	16,67%	16,67%	100,00%	
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	0	1	1	100,00	1	2	100,00	
	Penyebarluasan Informasi penataan Ruang	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	2	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persyaratan untuk mendapatkan surat gubernur hasil fasilitasi	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	4	1	4	1	25,00	0	2	50,00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Pemangku kepentingan yang mengikuti sosialisasi	85	0	80	80	100,00	0	80	94,12	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen tata guna lahan sesuai RTRW yang disusun	2,80%	2,80%	2,80%	2,75%	98,21%	2,80%	2,78%	99,40%	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	12	3	3	3	100,00	0	6	50,00	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)	Ket
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	0,2045	0,3334	0,2045	0,2574	125,87%	0,2045	0,2651	129,63%	
	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	17	1	12	12	100,00	2	15	88,24	
	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	12	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
	Sistem Informasi dan komunikasi Penataan Ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	4	1	1	1	0,00	1	3	75,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Ruang publik yang berubah peruntukannya	0	0	0	0,14	0,00%	0	0,05	0,00%	
	Koordinasi pelaksanaan penataan ruang	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang	40	12	4	4	100,00	12	28	70,00	
	Pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah kasus yang dikenakan sanksi administrasi	12	4	4	4	100,00	2	10	83,33	
	Penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen Tekstuakl dan Spasial hasil penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	1	0	0	0	0,00	0	0	0,00	
	Operasional tugas dan fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	8	0	0	0	0,00	0	0	0,00	

Dari Tabel 2.1 dapat dilihat bahwa :

- 1) Program yang belum memenuhi target indikator di tahun 2024 yaitu :
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi capaian 96,62 % dari target 99,88%;
 - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan realisasi capaian 96,88 % dari target 100%;
 - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan realisasi capaian 98,63 % dari target 99,99%
 - Program Penataan Bangunan Gedung dengan realisasi capaian rasio 0,73 dari target 0,75;
 - Program Penyelenggaraan Jalan dengan realisasi capaian 68,54% dari target 73,10%;

Faktor yang mempengaruhi tidak terpenuhinya capaian kinerja target indikator adalah sebagai berikut:

- a) Belum optimalnya pemantauan dan evaluasi rencana aksi perangkat daerah serta pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi SDM aparatur ASN;
- b) Belum optimalnya pengelolaan SPAM Jaringan Perpipaan meliputi pembangunan baru, peningkatan, perluasan jaringan perpipaan, dimana dari 77 KPSPAM yang berfungsi hanya 30 KPSPAM dan PDAM yang tidak berfungsi optimal dimana dari 7 IKK yang berfungsi hanya 1 IKK yaitu IKK Manarang serta kompetensi SDM pengelola SPAM;
- c) Belum optimalnya pengelolaan SPALD meliputi perencanaan, pembangunan, sarana dan prasarana pengangkutan, IPLT, pemeliharaan rutin/berkala, dan rehabilitasi serta peran swasta juga kurangnya kompetensi SDM pengelola air limbah dan kurangnya kesadaran masyarakat terkait hidup sehat;

- d) Belum adanya dokumen detail perencanaan tata ruang kawasan strategis di Kabupaten Pinrang;
- e) Belum optimalnya penerbitan PBG dan sosialisasi pelaksanaan kegiatan PBG kepada masyarakat;
- f) Belum optimalnya perencanaan pelaksanaan penyelenggaraan jalan; kurangnya sumber daya dalam menganalisis, mengolah data, penyusunan laporan dan mengkaji kualitas material yang digunakan.

Kebijakan atau tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan optimalisasi perencanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi perangkat daerah serta meningkatkan kualitas SDM dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan pekerjaan;
- b) Mengoptimalkan pengelolaan SPAM Jaringan Perpipaan meliputi pembangunan baru, peningkatan, perluasan jaringan perpipaan, meningkatkan kinerja pengelolaan PDAM khususnya di wilayah perkotaan serta peningkatan kompetensi SDM pengelola SPAM;
- c) Mengoptimalkan pengelolaan SPALD meliputi perencanaan, pembangunan, sarana dan prasarana pengangkutan, peningkatan kapasitas IPLT, pemeliharaan rutin/berkala, dan rehabilitasi serta peran swasta juga peningkatan kompetensi SDM pengelola air limbah dan pemberdayaan masyarakat akan pentingnya hidup sehat;
- d) Melakukan koordinasi kepada pihak yang terkait untuk penyediaan dokumen perencanaan tata ruang kawasan strategis Kabupaten Pinrang;
- e) Mengoptimalkan penerbitan PBG melalui peningkatan kualitas dan kinerja tim teknis dan TABG; mengintensifkan koordinasi tim teknis dan unit PTSP dalam penerbitan PBG serta

mengoptimalkan sosialisasi terkait pentingnya pelaksanaan SLF dan PBG dalam pembangunan kepada masyarakat;

- f) Mengoptimalkan perencanaan yang matang dan terstruktur untuk penyelenggaraan jalan termasuk anggaran; sumber daya; pemanfaatan teknologi dalam pemantauan kondisi jalan dan jembatan serta permasalahannya; meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM penyelenggaraan jalan dan jembatan;
- 2) Program yang memenuhi/melebihi target indikator yaitu :
 - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dengan realisasi capaian 22,42% dari target 22,42%
 - Program Pengembangan Permukiman dengan realisasi rasio capaian 0,09 dari target 0,09;
 - Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dengan realisasi capaian rasio 0,00189 dari target 0,00189;
 - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan realisasi capaian 100% dari target 100%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan data-data yang ada, ada beberapa indikator kinerja keluaran (*output performance*) dari Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang menunjukkan belum mencapai target, namun ada juga indikator kinerja keluaran (*output performance*) Program dan Kegiatan pada tahun 2024 telah mencapai target yang ditentukan. Hal ini berarti pelaksanaan Kegiatan yang ada di DPA dapat direalisasikan dengan baik oleh Pelaksana Kegiatan di Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang. Berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja dari kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pelaksana kegiatan telah berusaha maksimal untuk merealisasikan target kinerja yang telah disepakati dalam DPA kegiatan di awal tahun. Analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2024
Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target TPB/SDGs - SPM	Target Renstra Dinas BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG Tahun 2025-2026				Realisasi Capaian Tahun		Proyeksi Tahun		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	INDIKATOR KINERJA UTAMA											
1	Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah	-	-	Nilai 82,00 (A)	Nilai 82,00 (A)	Nilai 83,00 (A)	Nilai 84,00 (A)	Nilai 82,05 (A)	Nilai 83,00 (A)	Nilai 83,00 (A)	Nilai 84,00 (A)	
2	Nilai Survei kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah	-	-	94,61 (Sangat Baik)	94,61 (Sangat Baik)	94,65 (Sangat Baik)	94,70 (Sangat Baik)	94,61 (Sangat Baik)	94,30 (Sangat Baik)	94,65 (Sangat Baik)	94,70 (Sangat Baik)	
3	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	-	-	67,72%	68,49%	69,25%	70,02%	67,72%	68,54%	69, 25%	70,02%	
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi	-	-	96,08%	100%	100%	100%	96,33%	96,88%	100%	100%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	-	-	98,46%	99,99%	100%	100%	98,46%	98,63%	100%	100%	
6	Ketaatan terhadap RTRW	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	INDIKATOR KINERJA KUNCI - OUTCOME (Permendagri 18 Tahun 2020)											
1	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh kabupaten/kota	100%	-	96,08%	100%	100%	100%	96,08%	96,88%	100%	100%	
2	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	-	98,46%	99,99%	100%	100%	98,46%	98,63%	100%	100%	
3	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten/ kota	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Tingkat Kemantapan jalan Kabupaten/Kota	70%	-	67,72%	73,10%	69,25%	70,02%	67,72%	68,54%	69, 25%	70,02%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	(INDIKATOR KINERJA SPM (Permendagri Nomor 59 Tahun 2021))											
1	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	-	100%	100%	100,00%	100%	100%	96,08%	98,49%	100%	100%	
2	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	-	100%	98,45%	99,99%	100%	100%	98,44%	98,46%	100%	100%	
	INDIKATOR KINERJA TPB/SDGs (Perpres Nomor 59 Tahun 2017)											
1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	-	100%	83,83%	84,00%	84,65%	84,81%	83,83%	84,36%	84,65%	84,81%	
2	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	-	100,00%	96,33%	100%	100%	100%	96,33%	96,88%	100%	100%	
3	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	-	100%	98,59%	98,60%	98,69%	98,73%	98,59%	98,63%	98,69%	98,73%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	INDIKATOR KINERJA LAINNYA (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)											
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	-	-	53,07%	56,13%	59,95%	63,78%	53,07%	55,79%	59,95%	63,78%	
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	-	-	0,00156	0,00155	0,00146	0,00141	0,00156	0,00146	0,00146	0,00141	
3	Presentase kawasan permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	-	-	1,83%	1,83%	0%	0%	1,83%	1,83%	0%	0%	
4	Presentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/ Jam)	-	-	53,07%	56,13%	59,95%	63,78%	53,07%	55,79%	59,95%	63,78%	
5	Presentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	-	-	12,50%	12,50%	12,54%	13,00%	12,50%	2,30%	12,54%	13,00%	
6	Presentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan liar	-	-	1,10%	1,10%	1,07%	1,07%	1,10%	2,10%	1,07%	1,07%	
7	Presentase rumah tinggal bersanitasi	-	-	98,46%	99,99%	100,00 %	100,00 %	98,46%	98,63%	100%	100,00 %	
8	Presentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	-	-	20,81%	22,42%	23,71%	25,00%	20,81%	23,44%	23,71%	25,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Daerah tidak terjadi genangan >2 kali setahun	-	-	20,00%	30,00%	50,00%	60,00%	20,00%	31,79%	50,00%	60%	
10	Presentase penduduk berakses air minum	-	-	98,47%	100,00%	100%	100%	98,47%	98,49%	100%	100%	
11	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	-	-	96,33%	100,00%	100%	100%	96,33%	96,88%	100%	100%	
12	Rasio bangunan ber-IMB persatuan bangunan	-	-	0,73	0,74	0,74	0,74	0,73	0,74	0,74	0,74	
13	Ruang Publik yang berubah peruntukannya	-	-	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	2,09%	0,00%	0,00%	
14	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelitit dan survei foto udara terhadap luas daratan	-	-	0,3334	0,2045	0,2045	0,2045	0,3334	0,2574	0,2045	0,2045	

Dari Tabel 2.2 dapat dilihat Pencapaian Kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang pada Tahun 2024 sebagai berikut :

a. **Indikator Kinerja Utama (IKU)**, meliputi :

- Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan target Nilai 82,00 (A) realisasi Nilai 83,00 (A), tercapai 101,22%
- Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah dengan target Nilai 94,61 (sangat baik) realisasi Nilai 94,30 (sangat baik), tercapai 99,67%;
- Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten, target 73,10% realisasi 68,54%, tercapai 93,76%;
- Persentase jumlah RT yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi, target 100% realisasi 96,88%, tercapai 96,88%;
- Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik, target 99,99% realisasi 98,63%, tercapai 98,64%;
- Ketaatan terhadap RTRW, target 100% realisasi 100%, tercapai 100%;

Untuk pencapaian target Indikator Kinerja Utama secara keseluruhan dikategorikan baik, adapun yang masih perlu menjadi perhatian adalah indikator sebagai berikut:

1) **Kemantapan Jalan Kabupaten**, hal ini disebabkan oleh faktor :

- Adanya penurunan kondisi jalan dari kondisi sedang menjadi kondisi rusak ringan;
- Rendahnya Tingkat partisipatif masyarakat dalam hal ini pengguna jalan dalam menggunakan jalan sesuai beban muatan sumbu yang ditentukan;
- Terbatasnya sumber daya manusia aparatur untuk pelaksanaan pengawasan teknis baik di lapangan maupun

dalam hal perencanaan dan pemahaman terkait konstruksi jalan;

- Mahalnya biaya konstruksi pembangunan dan pemeliharaan jalan;
- Peningkatan beban volume lalu lintas;
- Sistem drainase yang belum optimal;
- Pengaruh iklim berupa hujan yang jatuh di atas permukaan jalan yang dapat menimbulkan retak-retak hingga terjadi alur yang menyebabkan turunnya kualitas jalan;
- Penanganan kerusakan (pemeliharaan jalan) tidak dilakukan secara dini dan tepat (kerusakan lubang yang terjadi akibat dari kerusakan-kerusakan kecil yang terus menerus dibiarkan, misalkan kerusakan retak yang telah menjadi lubang);
- Terbatasnya anggaran;

Rencana tindak lanjut untuk pencapaian target indikator kemantapan jalan adalah sebagai berikut:

- Memberdayakan dan meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam rangka pengawasan secara berkala terhadap ruas-ruas yang telah dikerjakan;
- Memberdayakan sumber daya aparatur untuk pemenuhan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan kabupaten beserta bangunan pelengkap;
- Memberdayakan dan meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam hal survei kondisi jalan secara berkala;
- Mengoptimalkan sistem drainase agar ruas jalan yang terbangun dapat lebih awet dan bermanfaat;
- Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui pelatihan dan bintek yang terkait perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap infrastruktur jalan;

- Peningkatan pembangunan infrastruktur jalan Kabupaten dan sarana/prasarana publik lainnya. Hal ini dilakukan melalui pemutakhiran SK panjang jalan kewenangan Kabupaten dan pemutakhiran data kondisi jalan/jembatan tiap tahun;
- Mengefektifkan anggaran sesuai asas manfaat;
- Mengintensifkan pengawasan berkala terhadap ruas-ruas jalan guna identifikasi penanganan kerusakan yang lebih maksimal;

2) **Persentase jumlah RT yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi**, hal ini disebabkan oleh faktor :

- PDAM yang tidak berfungsi optimal;
- Peran serta masyarakat dalam penggunaan SPAM bukan jaringan perpipaan yaitu sumur dangkal, sumur pompa, dan bak penampungan air hujan cukup tinggi;
- Kondisi topografi Kabupaten Pinrang yang didominasi wilayah pegunungan atau daratan tinggi ;
- Rendahnya pembangunan baru, peningkatan dan perluasan SPAM jaringan perpipaan yaitu unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan;
- Belum optimalnya kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana SPAM yang terbangun oleh penyelenggara SPAM;
- Rendahnya kompetensi sumber daya manusia pengelola SPAM serta kurang optimalnya tata kelola kelembagaan SPAM di daerah;

Rencana tindak lanjut untuk pencapaian target indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengoptimalkan kembali kinerja pengelolaan PDAM khususnya di wilayah perkotaan;

- Peningkatan dan optimalisasi infrastruktur SPAM yang telah dibangun;
- Peningkatan kegiatan sosialisasi dan informasi air minum layak dan aman bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat serta penggunaan air tanah sebagai sumber air bersih;
- Perluasan Jaringan Perpipaan melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur jaringan perpipaan air minum terutama di daerah perkotaan dan perdesaan yang sulit dijangkau;
- Peningkatan pembinaan kualitas dan kompetensi SDM aparatur serta penguatan pengelola KSM air minum.

3) **Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik**, hal ini disebabkan oleh faktor :

- IPLT yang tidak berfungsi optimal;
- Partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengelolaan air limbah domestik masih rendah khususnya dalam hal ini adalah penyedotan tinja;
- Kondisi topografi Kabupaten Pinrang yang didominasi wilayah pegunungan atau daratan tinggi ;
- Kurangnya pembangunan SPALD-S dan SPALD-T baru pada lokasi permukiman;
- Belum optimalnya kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana SPALD yang terbangun oleh penyelenggara SPALD;
- Rendahnya kompetensi sumber daya manusia pengelola SPALD serta kurang optimalnya tata kelola kelembagaan SPALD di daerah;

Rencana tindak lanjut untuk pencapaian target indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengoptimalkan kinerja IPLT di wilayah Malimpung;

- Peningkatan dan optimalisasi infrastruktur SPALD yang telah dibangun;
- Peningkatan kegiatan sosialisasi dan informasi sanitasi layak dan aman bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat serta kegiatan penyedotan tinja secara berkala;
- Perluasan pembangunan SPLDS dan SPLDY di wilayah permukiman;
- Peningkatan pembinaan kualitas dan kompetensi SDM aparatur serta penguatan pengelola KSM sanitasi,

Salah satu program kegiatan yang mendukung Pengarusutamaan gender berdasarkan IKU di Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang adalah kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM. Berdasarkan data tahun 2024 akses layanan air minum SPAM Jaringan perpipaan dapat dilihat pada tabel 2.3

Tabel 2.3
Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Jumlah Rumah Tangga di seluruh Kabupaten Pinrang tahun 2024

Kecamatan	Total Rumah	Rumah Tangga mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan
Suppa	7.681	636
Mattirobulu	7.115	1.238
Lanrisang	4.536	409
Watang Sawitto	13.845	0
Cempa	4.274	30
Mattiro Sompe	7.338	301
Duampanua	11.090	255
Patampanua	8.582	485
Lembang	11.420	1.460
Batulappa	2.563	175
Tiroang	5.065	350
Paleteang	8.606	0
Total	92.115	5.339

Pada tabel 2.3 di atas menunjukkan bahwa baru sekitar 5.339 RT di Kabupaten Pinrang yang telah mendapatkan akses air minum SPAM Jaringan perpipaan atau sekitar 5,80% dari seluruh Rumah di Kabupaten Pinrang. Hal ini menunjukkan bahwa target pemenuhan air minum di Kabupaten Pinrang khususnya jaringan perpipaan masih sangat kurang khususnya wilayah perkotaan dimana masyarakat perkotaan menggunakan sumber air dari air tanah melalui SPAM bukan jaringan perpipaan berupa sumur bor dan pompa dikarenakan tidak berfungsi optimalnya PDAM dimana dari 7 IKK hanya 1 IKK yang berfungsi. Selain itu hal ini juga dikarenakan belum optimalnya pengelolaan KPSPAM yang telah terbentuk, di mana dari 77 kelompok SPAM yang berfungsi/beroperasi ada 30 kelompok, sedangkan yang tidak berfungsi/beroperasi ada 47 kelompok. Kondisi topografi di Kabupaten Pinrang juga mempengaruhi tidak meratanya akses air minum ke masyarakat karena kondisi topografi yang bervariasi meliputi tiga dimensi kewilayahan, yaitu: dataran rendah, laut dan dataran tinggi. Pembagian wilayah tersebut antara lain:

- Wilayah dataran rendah yaitu: Kecamatan Patampanua, Wattang Sawitto dan Tiroang;
- Wilayah laut/pantai yaitu: Kecamatan Suppa, Lanrisang, Mattiro Sompe, dan Cempa;
- Wilayah bukit/gunung yaitu: Kecamatan Lembang, Duampanua dan Batulappa;

b. **Indikator Kinerja Kunci** (Permendagri Nomor 18 Tahun 2020) meliputi :

- Persentase jumlah RT yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh Kabupaten/Kota, target 100% realisasi 96,88%, tercapai 96,88%;

- Persentase jumlah RT yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik, target 99,99% realisasi 98,63%, tercapai 98,64%;
- Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten/Kota, target 100% realisasi 100%, tercapai 100%;
- Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota target 73,10% realisasi 68,54%, tercapai 93,76%;

Untuk pencapaian target Indikator Kinerja Kunci secara keseluruhan dikategorikan terpenuhi, adapun yang belum terpenuhi adalah indikator yang terkait **akses air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan bukan Jaringan Perpipaan terlindungi, RT yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik dan tingkat kemantapan jalan kabupaten**. Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya juga sama dengan faktor pada Indikator Kinerja Utama.

c. **Indikator Kinerja SPM** (Permendagri Nomor 59 Tahun 2021) meliputi :

- Persentase Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari, target 100% realisasi 98,49%, tercapai 98,49%;
- Persentase Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik , target 99,99% realisasi 98,46%, capaian 98,46%;

Untuk pencapaian target Indikator Kinerja SPM secara keseluruhan dikategorikan baik walaupun belum mencapai target SPM. Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya indikator **SPM Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik**, serta tindak

lanjutnya sama dengan faktor pada Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci.

d. **Indikator Kinerja TPB/SDG's** (Perpres Nomor 59 Tahun 2017)

meliputi :

- Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan, target 84% realisasi 84,36%, tercapai 100,43%;
- Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak, target 100% realisasi 96,88%, tercapai 96,88%;
- Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak, target 98,60% realisasi 98,63%, tercapai 99,75%;

Untuk pencapaian target Indikator Kinerja TPB/SDG's secara keseluruhan dikategorikan terpenuhi khususnya **RT yang memiliki akses layanan sanitasi layak dan berkelanjutan**. Sedangkan **RT yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak** belum mencapai target. Faktor penyebab belum tercapainya target serta tindak lanjut indikator tersebut pada dasarnya sama dengan IKU dan IKK serta indikator kinerja SPM.

e. **Indikator Kinerja Lainnya** (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) meliputi :

- Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, target 56,13% realisasi 55,79%, tercapai 99,39%;
- Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk, target 0,00155 realisasi 0,00146 tercapai 94,19%;

- Persentase kawasan permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4, target 1,83% realisasi 1,83%, capaian 100%;
- Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam), target 56,13% realisasi 55,79%, tercapai 99,39%;
- Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5m), target 12,50% realisasi 2,3%, capaian 18,40%;
- Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar, target 1,10% realisasi 2,10% , capaian 190%;
- Persentase Rumah tinggal bersanitasi, target 99,99% realisasi 98,63%, tercapai 98,63%;
- Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat, target 22,42% realisasi 23,44%, capaian 104,55%;
- Daerah Tidak terjadi genangan 2 kali setahun, target 30,00% realisasi 31,79%, capaian 105,96%;
- Persentase penduduk berakses air minum, target 100% realisasi 98,49%, capaian 98,49%;
- Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan, target 100% realisasi 96,88%, capaian 96,88%;
- Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan, target 0,74 realisasi 0,73, capaian 98,64%;
- Ruang publik yang berubah peruntukannya, target 0% realisasi 2,49%, capaian 0%;
- Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan, target 0,2045 realisasi 0,2574 capaian 125,87%;

Untuk pencapaian target Indikator Kinerja Lainnya secara keseluruhan dikategorikan terpenuhi, adapun yang belum terpenuhi adalah indikator yang terkait air minum, drainase, air limbah dan jalan. Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya indikator air minum, air limbah dan jalan dapat dilihat faktor pada Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci, dan Indikator Kinerja SPM. Untuk indikator kinerja Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan tidak terpenuhi disebabkan oleh :

- Tingginya penggunaan sumur bor/pompa di masyarakat padat penduduk karena struktur tanah di lokasi yaitu tanah rawa serta kepadatan bangunan;
- Tidak beroperasinya instalasi pengolahan air bersih PDAM di kawasan perkotaan.

Rencana tindak lanjut untuk pencapaian target indikator kinerja **Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan** adalah sebagai berikut:

- Membuat Peraturan/kebijakan terkait penggunaan air tanah sebagai sumber air bersih untuk mengurangi penggunaan sumur bor dan pompa;
- Koordinasi dengan PDAM untuk mengoptimalkan kembali kinerja PDAM khususnya di wilayah perkotaan;

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Hasil evaluasi terhadap gambaran umum kondisi daerah dan analisis permasalahan pembangunan yang menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan pembangunan mendatang yang tercantum dalam dokumen RPD

Kabupaten Pinrang Tahun 2025 – 2026. Hal yang menjadi prioritas dalam hal pengembangan infrastruktur adalah :

1. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan;
2. Kualitas Sumber Daya Manusia yang terbatas; dan
3. Ketersediaan Infrastruktur wilayah yang terbatas.

Selanjutnya rumusan permasalahan tersebut dijabarkan dalam bentuk akar masalah, seperti pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Pemetaan Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Perencanaan kinerja belum tepat dalam melakukan cascading kinerja baik pada level tujuan dan sasaran maupun pada level program dan kegiatan Belum ada kebijakan atau SOP internal yang mengatur mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja Laporan kinerja pemerintah daerah belum menyajikan benchmark kinerja Analisis efisiensi belum menggambarkan upaya efisiensi anggaran yang dilakukan dalam mencapai target kinerja Hasil evaluasi SAKIP internal belum memberikan rekomendasi yang cukup dan menyentuh langsung akar permasalahan
		Belum optimalnya pelayanan publik	Pemanfaatan inovasi teknologi dalam penyelenggaraan pelayanan publik belum optimal
2	Kualitas Sumber Daya Manusia yang Terbatas	Masih Rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender	Masih rendahnya kualitas sumber daya perempuan yang mengakibatkan ketidakberdayaan bersaing dengan kaum lelaki dalam pembangunan.
3	Ketersediaan Infrastruktur Wilayah yang Terbatas	Belum optimalnya pembangunan kawasan strategis pedesaan dalam rangka meningkatkan status desa menjadi desa mandiri	Belum optimalnya kerjasama antar desa
			Pengelolaan kelembagaan ekonomi mikro yang belum intensif
			Belum optimalnya pembangunan sarana prasarana infrastruktur dasar pedesaan
		Masih rendahnya capaian indeks layanan infrastruktur	Belum optimalnya konektivitas antara kawasan perkotaan yang meliputi Pusat Kegiatan Lokal (PKL), pusat pelayanan kawasan maupun pusat pelayanan lingkungan
			Belum optimalnya konektivitas antara kawasan perkotaan dengan pusat-pusat kegiatan kawasan perdesaan
			Masih terbatasnya akses pelayanan air minum dan air limbah
			Belum optimalnya pengelolaan sistem drainase perkotaan berbasis data

Sumber : RPD Kabupaten Pinrang Tahun 2025-2026

Tabel 2.5
Identifikasi Isu Kesenjangan dan Ketidakadilan gender dalam
Pembangunan Infrastruktur

Identifikasi Isu Gender	Sebab Kesenjangan	
	Internal	Eksternal
<u>Akses :</u> Terbatasnya akses pengelolaan air minum khususnya jaringan perpipaan di Kabupaten Pinrang. <u>Partisipasi:</u> Jumlah partisipasi masyarakat masih rendah dalam pengelolaan dan pemanfaatan SPAM <u>Kontrol:</u> Rendahnya pengawasan terhadap pengelolaan penggunaan SPAM. <u>Manfaat:</u> Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai manfaat dan pengelolaan air bersih	Belum tersedianya data terkait sumber air baku Belum melakukan analisis mengenai masalah penggunaan air tanah sebagai sumber air baku infrastruktur penunjang untuk fasilitas air minum masih kurang Belum adanya alat penentuan sumber air Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi infrastruktur yang terbangun	Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kebutuhan air minum yang layak dan aman Rendahnya pengetahuan teknis pengelolaan SPAM oleh KPSPAM Kondisi wilayah sumber air yang sulit dijangkau khususnya daerah pegunungan

Sumber : GAP Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang tahun 2025

Dari tabel isu Kesenjangan dan Ketidakadilan gender dalam pembangunan Infrastruktur di atas melalui beberapa dimensi yang menjadi faktor penyebab kesenjangan dan ketidakadilan gender dalam pembangunan sebagai isu strategi pembangunan adalah:

a. Akses

Terbatasnya akses pengelolaan air minum khususnya jaringan perpipaan di Kabupaten Pinrang:

- Jarak sumber air ke lokasi tempat tinggal masyarakat cukup sulit dan relatif jauh, khususnya wilayah pegunungan;
- Tidak meratanya pembagian jaringan perpipaan di beberapa wilayah kecamatan antara lain (sarana infrastruktur SPAM, lokasi titik sumber air)

b. Partisipasi

Jumlah partisipasi masyarakat masih rendah dalam pengelolaan dan pemanfaatan SPAM , disebabkan oleh:

- Kegiatan SPAM belum menjadi prioritas usulan musrembang masyarakat;
- Informasi masyarakat terkait pengelolaan SPAM di beberapa wilayah kecamatan terbatas, sehingga pengetahuan terkait kualitas air minum yang dikonsumsi masih kurang;
- Informasi Kelompok Pengelolaan SPAM terkait teknis pelaksanaan dan pengelolaan infrastruktur SPAM masih rendah.

c. Kontrol

Rendahnya pengawasan terhadap pengelolaan penggunaan SPAM, disebabkan oleh:

- Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap infrastruktur SPAM yang telah dibangun;
- Rendahnya pengetahuan KPSPAM terkait optimalisasi dan pemeliharaan infrastruktur SPAM yang ada;
- Rendahnya kontrol pemanfaatan air tanah dengan penggunaan sumur bor oleh masyarakat khususnya wilayah dataran.

d. Manfaat

- Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai manfaat dan pengelolaan air bersih;
- Belum optimalnya kinerja pengelolaan SPAM oleh KPSPAM.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang dengan visi dan misi Bupati terkait program prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang dapat dilihat Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	-	-	2.270.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAN AIR MINUM		Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan	8,56%	2.270.000.000	KUA PPAS(KEBI JAKAN UMUM ANGGARAN PPAS)
								Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi	89,03%		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	2.270.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Jumlah RT memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	97,89%	2.270.000.000	
								Persentase Jumlah RT yang menggunakan pelayanan air minum yang dikelola secara aman, berlokasi di dalam atau di halaman rumah, dan air tersedia sepanjang tahun	33,05%		
								Persentase rumah tangga dengan akses air minum aman jaringan perpipaan	6,53%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Pinrang, Paleteang Laleng Bata	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	50 orang	50.000.000	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Pinrang, Paleteang Laleng Bata	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	50 orang	50.000.000	Penyesuaian kebutuhan
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Pinrang, Paleteang Laleng Bata	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	150.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Pinrang, Paleteang Laleng Bata	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	150.000.000	Hasil pemetaan
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Pinrang, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	3,25 liter/detik	600.000.000	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Desa/Kel	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	3,25 liter/detik	600.000.000	Penyesuaian anggaran
	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Kab. Pinrang, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	2 Desa	50.000.000	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Kab. Pinrang, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	2 Desa	50.000.000	Penyesuaian anggaran
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Pinrang, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	3 liter/detik	1.000.000.000	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Pinrang, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	3 liter/detik	1.000.000.000	Penyesuaian anggaran
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Pinrang, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	250 SR	420.000.000	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Desa/Kel	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	250 SR	420.000.000	Penyesuaian anggaran

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	-	-	975.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Kinerja Pelayanan SPALD-S Akses Aman	3,53%	975.000	
								Kinerja Pelayanan SPALD-T Akses Aman	1,56%		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	975.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase jumlah rumah tangga yang bersanitasi	98,87%	975.000.000	
								Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	98,87%		
								Persentase jumlah rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	5,09%		
	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Desa/Kel	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	1 unit	800.000.000	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Desa/Kel	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	1 unit	700.000.000	Penyesuaian kebutuhan
	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Desa/Kel	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	150 RT	60.000.000	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Desa/Kel	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	150 RT	60.000.000	Penyesuaian anggaran
	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Desa/Kel	Jumlah Desa yang dibina dalam pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	3 Desa	35.000.000	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Desa/Kel	Jumlah Desa yang dibina dalam pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	3 Desa	35.000.000	Penyesuaian anggaran

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Desa/Kel	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang dioperasikan dan dipelihara	2 unit	50.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Desa/Kel	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang dioperasikan dan dipelihara	2 unit	50.000.000	Penyesuaian anggaran
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Desa/Kel	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	50 Orang	30.000.000	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Desa/Kel	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	50 Orang	30.000.000	Penyesuaian anggaran
	Penyediaan Unit Pengolahan Setempat	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Desa/Kel	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	14 Rumah Tangga	0.00	Penyediaan Unit Pengolahan Setempat	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Desa/Kel	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	14 Rumah Tangga	100.000.000	Penyesuaian anggaran
IV	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-	-	-	2.295.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Desa/Kel	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	59,49%	2.295.000.000	
	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	2.295.000.000	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang (Perkotaan)	Persentase drainase yang tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	40,69%	2.295.000.000	
								Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	21,32%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Desa	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang dibangun	1000 m	1.000.000.000	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Desa	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang dibangun	1000 m	1.000.000.000	Penyesuaian anggaran
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Desa	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan	50 Orang	20.000.000	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Desa	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan	50 Orang	20.000.000	Penyesuaian anggaran
	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Desa	Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya	1 Kawasan Genangan	100.000.000	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Desa	Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya	1 Kawasan Genangan	100.000.000	Penyesuaian anggaran
	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Desa	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	1 Sistem Drainase Perkotaan	350.000.000	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Desa	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	1 Sistem Drainase Perkotaan	350.000.000	Penyesuaian anggaran
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Desa	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang dibangun	3 sistem drainase perkotaan	675.000.000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Desa	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang dibangun	3 sistem drainase perkotaan	675.000.000	Penyesuaian anggaran
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Desa	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	2 sistem drainase perkotaan	150.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Desa	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	2 sistem drainase perkotaan	150.000.000	Penyesuaian anggaran
V	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	-	-	-	2.000.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		Persentase Kawasan Strategis yang terfasilitasi penyelenggaraan Infrastruktur permukiman (%)	7,14%	2.000.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah kabupaten/Kota	-	-	-	1.000.000.000	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah kabupaten/Kota	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Desa	Persentase infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah	17,65%	1.000.000.000	
	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Desa	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	1 Unit	500.000.000	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Desa	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	1 Unit	500.000.000	Penyesuaian anggaran
	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Desa	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	1 Unit	500.000.000	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Desa	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	1 Unit	500.000.000	Penyesuaian anggaran
	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Desa	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	82,33	0.00	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Desa	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	82,33	0.00	Penyesuaian anggaran
VI	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-	-	-	1.280.000.000	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Rasio kepatuhan IMB Kabupaten/ Kota	1.00	1.280.000.000	
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah kabupaten/Kota, Pemberiaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-	-	1.280.000.000	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah kabupaten/Kota, Pemberiaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	1,1553	1.280.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Desa	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Dokumen	150.000.000	Penyusunan Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Desa	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Dokumen	150.000.000	Penyesuaian anggaran
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten Kota	Kab. Pinrang	Jumlah dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	930.000.000	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten Kota	Kab. Pinrang	Jumlah dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	930.000.000	Penyesuaian anggaran
	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kab. Pinrang	Jumlah Penerbitan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	150 dokumen	200.000.000	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kab. Pinrang	Jumlah Penerbitan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	150 dokumen	200.000.000	Penyesuaian anggaran
VII	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-	-	-	550.000.000	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Kab. Pinrang	Rasio penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis kabupaten	0,033	550.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	550.000.000	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang	Persentase bangunan dan lingkungannya yang tertata di kawasan strategis kabupaten	4%	550.000.000	
	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	100.000.000	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	100.000.000	Penyesuaian anggaran
	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	1 kawasan	350.000.000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	1 kawasan	350.000.000	Penyesuaian anggaran
	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	20 orang	100.000.000	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	20 orang	100.000.000	Penyesuaian anggaran
VIII	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-	-	62.280.528.358	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Kab. Pinrang	Persentase kemandapan jalan	71,75%	61.280.699.026	
	Penyelenggaraan Jalan Kabupate/Kota	-	-	-	62.280.528.358	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Rasio panjang jalan per jumlah penduduk	0,00151	61.280.699.026	
								Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	1,83 %		
								Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	60,38%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan Leger Jalan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang dikelola	1 dokumen	230.000.000	Pengelolaan Leger Jalan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang dikelola	1 dokumen	230.000.000	Penyesuaian Kebutuhan
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang disusun	1 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang disusun	1 Dokumen	100.000.000	Penyesuaian anggaran
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	5,7 km	1.900.000.000	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	5,7 km	1.900.000.000	Penyesuaian kebutuhan
	Pembangunan Jalan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Panjang jalan yang dibangun sampai perkerasan	9 km	42.163.000.000	Pembangunan Jalan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Panjang jalan yang dibangun sampai perkerasan	9 km	42.163.000.000	Penyesuaian anggaran
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Panjang jalan yang dipelihara secara berkala	0,42 km	1.527.528.358	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Panjang jalan yang dipelihara secara berkala	0,42 km	1.527.528.358	Penyesuaian kebutuhan
	Penggantian Jembatan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Panjang jembatan yang dilakukan penggantian	30 Meter	150.000.000	Penggantian Jembatan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Panjang jembatan yang dilakukan penggantian	30 Meter	150.000.000	Penyesuaian kebutuhan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rehabilitasi Jembatan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	30 Meter	410.000.000	Rehabilitasi Jembatan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	30 Meter	410.000.000	Penyesuaian kebutuhan
	Rekonstruksi Jalan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Panjang jalan yang dilakukan rekonstruksi	4,5 km	13.500.000.000	Rekonstruksi Jalan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Panjang jalan yang dilakukan rekonstruksi	4,5 km	13.500.000.000	Penyesuaian anggaran
	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	10 Meter	800.000.000	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	10 Meter	800.000.000	Penyesuaian kebutuhan
	Pembangunan Jembatan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Panjang jembatan yang dibangun	28 Meter	1.500.000.000	Pembangunan Jembatan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Panjang jembatan yang dibangun	28 Meter	1.500.000.000	Penyesuaian anggaran
X	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	-	-	-	882.630.000	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang dalam RTRW	100 %	882.630.000	
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-	-	-	882.630.000	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		Persentase kebijakan peraturan penataan ruang yang diterbitkan di kabupaten	0%	882.630.000	
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	100.000.000	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	100.000.000	Penyesuaian anggaran

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Publikasi Informasi Penataan Ruang	1 Publikasi	50.000.000	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Publikasi Informasi Penataan Ruang	1 Publikasi	50.000.000	Penyesuaian kebutuhan
	Pelaksanaan Fasilitas RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitas	2 Dokumen	100.000.000	Pelaksanaan Fasilitas RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitas	2 Dokumen	100.000.000	Penyesuaian kebutuhan
	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	100.000.000	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	100.000.000	Penyesuaian kebutuhan
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- Undangan Bidang Penataan Ruang	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	1 Laporan	50.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	1 Laporan	50.000.000	Penyesuaian anggaran
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	-	100.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase kebijakan peraturan perencanaan penataan ruang yang disusun	5%	100.000.000	
	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	2 orang	50.000.000	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	2 orang	50.000.000	Penyesuaian kebutuhan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah kegiatan peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat	1 Kegiatan	50.000.000	Peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah kegiatan peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat	1 Kegiatan	50.000.000	Penyesuaian kebutuhan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	-	100.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota		Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	0,2045	100.000.000	
	Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	2 Dokumen	50.000.000	Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	2 Dokumen	50.000.000	Penyesuaian kebutuhan
	Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Sistem Informasi dan Komunikasi penataan ruang	1 Sistem Inormasi	50.000.000	Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Sistem Informasi dan Komunikasi penataan ruang	1 Sistem Inormasi	50.000.000	Penyesuaian kebutuhan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	282.630.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Ruang publik yang berubah peruntukannya	0%	282.630.000	
	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	4 kasus	50.000.000	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	4 kasus	50.000.000	Penyesuaian kebutuhan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah dokumen koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	2 Dokumen	132.630.000	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah dokumen koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	2 Dokumen	132.630.000	Penyesuaian kebutuhan
	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Dokumen tekstual dan spasial hasil penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	3 Dokumen	50.000.000	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Dokumen tekstual dan spasial hasil penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	3 Dokumen	50.000.000	Penyesuaian kebutuhan
	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	2 laporan	50.000.000	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	2 laporan	50.000.000	Penyesuaian anggaran
XI	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	13.176.083.708	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab.PinrangKec. Paleteang,Laleng Bata	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	97,89%	13.176.083.708	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	112.256.150	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.PinrangKec. Paleteang,Laleng Bata	Persentase laporan dan dokumen perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang tersusun	100%	112.256.150	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Pinrang Kec. Paleteang,Laleng Bata	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	20.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.PinrangKec. Paleteang,Laleng Bata	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	20.000.000	Penyesuaian kebutuhan
	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Kab.Pinrang Kec. Paleteang,Laleng Bata	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	12.757.500	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Kab.PinrangKec. Paleteang,Laleng Bata	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	12.757.500	Penyesuaian kebutuhan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Kab.Pinrang Kec. Paleteang,L aleng Bata	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	18.600.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Kab.PinrangKec. Paleteang,Laleng Bata	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	18.600.000	Penyesuaian kebutuhan
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab.Pinrang Kec. Paleteang,L aleng Bata	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	4.900.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	4.900.000	Penyesuaian kebutuhan
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab.Pinrang Kec. Paleteang,L aleng Bata	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	7.459.650	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	7.459.650	Penyesuaian kebutuhan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Pinrang Kec. Paleteang,L aleng Bata	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	18.039.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Pinrang Kec. Paleteang,Laleng Bata	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	18.039.000	Penyesuaian kebutuhan
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Pinrang Kec. Paleteang,L aleng Bata	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Pinrang Kec. Paleteang,Laleng Bata	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10.500.000	Penyesuaian kebutuhan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	10.000.000	Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	10.000.000	Penyesuaian kebutuhan
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Dokumen	10.000.000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, semua Kel/Desa	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Dokumen	10.000.000	Penyesuaian kebutuhan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	8.024.518.905	Administrasi Keuangan Perangkat	Kec. Paleteang	Persentase serapan anggaran secara tepat waktu sesuai aturan	98%	8.024.518.905	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Pinrang Kec. Paleteang,L aleng Bata	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/bulan	7.165.810.850	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Pinrang Kec. Paleteang,Laleng Bata	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/bulan	7.165.810.850	Penyesuaian anggaran
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab.Pinrang Kec. Paleteang,L aleng Bata	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	400.009.155	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab.PinrangKec. Paleteang,Laleng Bata	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	400.009.155	Penyesuaian kebutuhan
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi keuangan SKPD	Kab.Pinrang Kec. Paleteang,L aleng Bata	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi keuangan SKPD	12 Dokumen	425.097.200	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi keuangan SKPD	Kab.PinrangKec. Paleteang,Laleng Bata	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi keuangan SKPD	12 Dokumen	425.097.200	Penyesuaian kebutuhan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Pinrang Kec. Paleteang,L aleng Bata	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.617.750	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.PinrangKec. Paleteang,Laleng Bata	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.617.750	Penyesuaian anggaran Penyesuaian kebutuhan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	Kab.Pinrang Kec. Paleteang,Laleng Bata	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semester an SKPD	12 Laporan	22.983.950	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	Kec. Paleteang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	12 laporan	22.983.950	Penyesuaian anggaran
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	13.218.600	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Paleteang	Persentase barang milik daerah yang tercatat dalam daftar pengguna barang	100%	13.218.600	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab.Pinrang Kec. Paleteang,Laleng Bata	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 dokumen	3.218.600	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab.PinrangKec. Paleteang,Laleng Bata	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 dokumen	3.218.600	Penyesuaian anggaran
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab.Pinrang Kec. Paleteang,Laleng Bata	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	10.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Paleteang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	10.000.000	Penyesuaian kebutuhan
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	-	2.000.000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kec. Paleteang	Persentase capaian layanan pengelolaan pendapatan daerah	97,84%	2.000.000	
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab.Pinrang Kec. Paleteang,Laleng Bata	Jumlah Laporan Pengelolaan retribusi Daerah	12 Dokumen	2.000.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab.PinrangKec. Paleteang,Laleng Bata	Jumlah Laporan Pengelolaan retribusi Daerah	12 Dokumen	2.000.000	Penyesuaian kebutuhan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	248.864.600	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Paleteang	Persentase capaian layanan administrasi kepegawaian	100%	248.864.600	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Kab.Pinrang Kec. Paleteang,Laleng Bata	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	73.029.600	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Kab.PinrangKec. Paleteang,Laleng Bata	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	73.029.600	Penyesuaian kebutuhan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab.Pinrang Kec. Paleteang,L aleng Bata	Jumlah Dokumen Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	25.835.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab.PinrangKec. Paleteang,Laleng Bata	Jumlah Dokumen Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	25.835.000	Penyesuaian kebutuhan
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab.Pinrang Kec. Paleteang,L aleng Bata	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18 Orang	150.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab.PinrangKec. Paleteang,Laleng Bata	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18 Orang	150.000.000	Penyesuaian kebutuhan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	423.350.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100%	423.350.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi	Kab.Pinrang Kec. Paleteang,L aleng Bata	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.PinrangKec. Paleteang,Laleng Bata	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	Penyesuaian kebutuhan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Pinrang Kec. Paleteang,L aleng Bata	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yangn disediakan	1 Paket	20.600.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.PinrangKec. Paleteang,Laleng Bata	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yangn disediakan	1 Paket	20.600.000	Penyesuaian kebutuhan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Pinrang Kec. Paleteang,L aleng Bata	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3 Paket	35.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.PinrangKec. Paleteang,Laleng Bata	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3 Paket	35.000.000	Penyesuaian kebutuhan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.Pinrang Kec. Paleteang,L aleng Bata	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	44.600.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.PinrangKec. Paleteang,Laleng Bata	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	44.600.000	Penyesuaian kebutuhan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Bahan/Material	Kab.Pinrang Kec. Paleteang,L aleng Bata	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	1 Paket	36.750.000	Penyediaan Bahan/Material	Kab.PinrangKec. Paleteang,Laleng Bata	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	1 Paket	36.750.000	Penyesuaian kebutuhan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Pinrang Kec. Paleteang,L aleng Bata	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 Laporan	250.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.PinrangKec. Paleteang,Laleng Bata	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 Laporan	250.000.000	Penyesuaian kebutuhan
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab.Pinrang Kec. Paleteang,L aleng Bata	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	8.400.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab.PinrangKec. Paleteang,Laleng Bata	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	8.400.000	Penyesuaian kebutuhan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	947.339.500	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Paleteang	Presentase kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	100%	947.339.500	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Pinrang Kec. Paleteang,L aleng Bata	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	60.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.PinrangKec. Paleteang,Laleng Bata	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	60.000.000	Penyesuaian anggaran
	Pengadaan Alat Besar	Kab.Pinrang Kec. Paleteang,L aleng Bata	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 unit	500.000.000	Pengadaan Alat Besar	Kab.PinrangKec. Paleteang,Laleng Bata	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 unit	500.000.000	Penyesuaian anggaran
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Pinrang Kec. Paleteang,L aleng Bata	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	153.389.500	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.PinrangKec. Paleteang,Laleng Bata	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	153.389.500	Penyesuaian kebutuhan
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Pinrang Kec. Paleteang,L aleng Bata	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	200.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.PinrangKec. Paleteang,Laleng Bata	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	200.000.000	Penyesuaian kebutuhan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Pinrang Kec. Paleteang,L aleng Bata	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	33.950.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.PinrangKec. Paleteang,Laleng Bata	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	33.950.000	Penyesuaian kebutuhan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	1.298.000.033	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Paleteang	Persentase capaian jasa penunjang urusan kantor	100%	1.298.000.033	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Pinrang Kec. Paleteang,L aleng Bata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	198.000.033	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.PinrangKec. Paleteang,Laleng Bata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	198.000.033	Penyesuaian anggaran
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Pinrang Kec. Paleteang,L aleng Bata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.100.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.PinrangKec. Paleteang,Laleng Bata	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.100.000.000	Penyesuaian anggaran
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	2.104.535.920	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Paleteang	Persentase capaian barang milik daerah penunjang urusan kantor yang terpelihara	100%	2.104.535.920	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Pinrang Kec. Paleteang,L aleng Bata	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 unit	1.281.815.920	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.PinrangKec. Paleteang,Laleng Bata	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 unit	1.281.815.920	Penyesuaian kebutuhan
	Peneliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Pinrang Kec. Paleteang,L aleng Bata	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	95 Unit	342.000.000	Peneliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.PinrangKec. Paleteang,Laleng Bata	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	95 Unit	342.000.000	Penyesuaian kebutuhan
	Peneliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Pinrang Kec. Paleteang,L aleng Bata	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 unit	280.720.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.PinrangKec. Paleteang,Laleng Bata	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 unit	280.720.000	Penyesuaian kebutuhan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Pinrang Kec. Paleteang,L aleng Bata	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi	2 unit	200.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.PinrangKec. Paleteang,Lalen g Bata	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	200.000.000	Penyesuai an kebutuhan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sistem perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan yang terintegrasi ke dalam suatu dokumen perencanaan. Kelima pendekatan ini meliputi pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*):

1. Pendekatan politik memandang bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah tidak terlepas dari kebijakan perencanaan pembangunan nasional.
2. Perencanaan pembangunan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.
3. Perencanaan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan.
4. Pendekatan atas-bawah (*top-down*) merupakan perencanaan yang diawali dari Pemerintah Pusat yang ditujukan ke Pemerintah Daerah.
5. Pendekatan bawah-atas (*bottom-up*) merupakan perencanaan yang diawali dengan penyusunan perencanaan dari tingkat lapisan masyarakat bawah yang kemudian diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten.

Dalam perencanaan pembangunan dengan pendekatan bawah atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*) yang dilaksanakan melalui musyawarah mulai dari desa, kecamatan, kabupaten / kota, provinsi, dan nasional sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan daerah. Dengan diterapkannya pendekatan ini, maka Prinsip-prinsip *good goverment* dalam tata

Pemerintahan Daerah akan dapat diwujudkan dan dilembagakan dengan mudah, tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Hubungan dan Komunikasi antara Birokrasi daerah dan Masyarakat akan mudah dijalin dengan sangat baik

Dalam proses tersebut didapatkan usulan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-sosiasi, perguruan tinggi,dll. Dari hasil tersebut, terdapat beberapa usulan program/kegiatan yang terkait dengan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai pelaksana penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan daerah, statistik serta penelitian dan pengembangan, pengendalian, monitoring dan evaluasi. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 disajikan data dalam Tabel 2.7

Tabel 2.7.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026
Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
I	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kab. Pinrang	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi	89,03%	
			Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terlindungi	8,56%	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase jumlah RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	97,89%	
			Persentase jumlah RT yang menggunakan pelayanan air minum yang dikelola secara aman, berlokasi di dalam atau di halaman rumah, dan air tersedia sepanjang tahun	33,05%	

			Persentase rumah tangga dengan akses air minum aman jaringan perpipaan	6,53%	
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	50 org	Perempuan: 15org Laki-laki:35 org
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (liter/detik)	3,25 liter/detik	
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	3,00 liter/detik	
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan		Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	250 SR	Perempuan : 75, laki laki: 175
II	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Kinerja Penyediaan pelayanan SPALDS akses aman	3,54%	
			Kinerja Penyediaan pelayanan SPALDT akses aman	1,56%	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase jumlah rumah tangga yang bersanitasi	98,87%	
			Persentase jumlah rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara Aman	5,10%	
	Optimalisasi InstalasiPengolahan Lumpur Tinja (IPLT)		Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi (unit)	1 unit	
	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja		Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (RT)	150 RT	
	Penyediaan Unit Pengolahan setempat		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik sesuai dengan Standar (RT)	100 RT	
III	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	59,49%	
	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase daerah yang tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	41,00%	
			Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	21,32%	
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan		Panjang saluran drainase lingkungan yang dibangun (m)	1000 m	
	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (sistem)	1 sistem	

	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (sistem)	3 sistem	
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		Persentase Kawasan Strategis yang terfasilitasi penyelenggaraan Infrastruktur permukiman (%)	7,14%	
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Persentase infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis	17,65%	
	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota		Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi (Unit)	1 unit	
	Optimalisasi TPST di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota		Jumlah TPST di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	1 unit	
V	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota	1,00	
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	1,00	
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/kota		Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/kota (dokumen)	1 Dok.	
	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB) Tim Profesi Ahli (TPA) Tim Penilai Teknis (TPT) Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB) Tim Profesi Ahli (TPA) Tim Penilai Teknis (TPT) Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	150 Dok.	
VI	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		Rasio penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis kabupaten	0,033	
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase bangunan dan lingkungannya yang tertata di Daerah (persen)	6,00%	

	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	1 kawasan	
VII	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Persentase Kemantapan Jalan (%)	71,75%	
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,00151	
			Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	1,83%	
			Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/Jam)	60,38%	
	Pengelolaan Leger Jalan		Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola (dokumen)	1 dok	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (dokumen)	1 dok	
	Pembangunan Jalan		Panjang Jalan yang Dibangun (km)	9 km	
	Rekonstruksi Jalan		Panjang Jalan yang Direkonstruksi (km)	4,5 km	
	Pemeliharaan Berkala Jalan		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (km)	0,42 km	
	Rehabilitasi Jembatan		Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (m)	30 m	
	Pembangunan Jembatan		Panjang Jembatan yang Dibangun (m)	28 m	
	Pemeliharaan Berkala Jembatan		Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala (m)	10 m	
	Pemeliharaan Rutin Jalan		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (km)	5,7 km	
VIII	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang dalam RTRW	100%	
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		Persentase kebijakan penataan ruang yang diterbitkan sesuai aturan	5,00%	
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen administrasi persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota (dokumen)	2 dok	

	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang		Jumlah publikasi informasi penataan ruang (publikasi)	1 publikasi	
	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota		Jumlah perkara RDTR Kabupaten/Kota (perkara)	2 Dokumen	
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang		Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang (laporan)	1 laporan	
	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kebijakan peraturan perencanaan penataan ruang yang disusun	5.00%	
	Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Penataan Ruang		Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (orang)	2 orang	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	0,2045	
	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang		Jumlah dokumen koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (dokumen)	2 dok.	
	Sistem Informasi dan Komunikasi penataan Ruang		Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (sistem)	1 sistem	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Ruang publik yang berubah peruntukannya	0%	
	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang		Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang (kasus)	4 kasus	
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang (dokumen)	2 dok.	
	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK		Dokumen tekstual dan spasial hasil penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (dokumen)	3 dok.	
	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang		Jumlah laporan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang (laporan)	2 laporan	
IX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	97,89%	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase laporan dan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100%	

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2 dok.	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	1 dok	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen)	1 dok	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (dokumen)	1 dok	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (dokumen)	1 dok	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	5 laporan	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	4 laporan	
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1 Dok.	
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (data)	1 Data	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase serapan anggaran secara tepat waktu dan sesuai aturan	98%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang)	71 orang/bulan	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	12 dok.	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	12 dok	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	1 laporan	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD (laporan)	12 laporan	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase barang milik daerah yang tercatat dalam daftar pengguna barang	100%	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)	4 dok	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	2 lap	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase capaian layanan pengelolaan administrasi pendapatan daerah	97,84%	
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	12 dok	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase capaian layanan administrasi kepegawaian	100%	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)	2 paket	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dokumen)	5 dok.	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (orang)	18 orang	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	1 paket	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	1 paket	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	3 paket	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	12 dok.	
	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (paket)	1 paket	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	110 laporan	

	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (dokumen)	1 dok.	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	100%	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (unit)	2 unit	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	5 unit	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase capaian jasa penunjang urusan kantor	100%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12 lap	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12 lap	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase capaian barang milik daerah penunjang urusan kantor yang terpelihara	100%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	36 unit	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	95 unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara/terrehabilitasi (unit)	4 unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	2 unit	

BAB III

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Tujuan RPJMN 2025-2029 adalah untuk mencapai sasaran utama penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi, adil, dan berkelanjutan. Berdasarkan tujuan tersebut arah kebijakan pembangunan wilayah pada RPJMN 2025-2029 berfokus pada **penguatan koridor ekonomi dan keterpaduan antarwilayah**, dengan tujuan mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan serta pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Kebijakan ini akan memperkuat **pembangunan infrastruktur**, mengembangkan **industri dari desa** dan berbasis sumber daya alam, serta meningkatkan **konektivitas antarwilayah** melalui pemetaan dan pemanfaatan potensi wilayah. Hal ini sesuai dengan tujuan dan sasaran yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DISBIMACIPTA yaitu mewujudkan **konektivitas wilayah, penataan ruang yang baik, serta penyediaan layanan dasar seperti jalan, air bersih, dan sanitasi yang merata bagi masyarakat** dengan merumuskan rencana program dan kegiatan sesuai prioritas pembangunan nasional.

Program-program strategis DISBIMACIPTA yang mendukung prioritas pembangunan nasional di tahun 2026 dalam hal upaya pencapaian target SDGs/TPB yaitu :

- (1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- (2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

Target-target SDGs/TPB menjadi prioritas pembangunan nasional telah sejalan dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. Sedangkan pencapaian

target SDGs/TPB ditingkat Kabupaten/Kota telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2025-2029. Dan untuk mencapai tujuan SDGs/TPB maka DISBIMACIPTA berkontribusi pada Tujuan 6 : **Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk semua**. Tujuan ini mencakup penyediaan akses universal terhadap air minum yang aman dan terjangkau, sanitasi dan kebersihan yang memadai, serta peningkatan kualitas air dengan mengurangi polusi dan limbah berbahaya. SDG 6 juga berupaya meningkatkan efisiensi penggunaan air, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu dan melindungi serta memulihkan ekosistem yang berkaitan dengan air.

Analisis gender adalah suatu informasi untuk menjamin manfaat dan sumber daya pembangunan secara efektif dan adil ditujukan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Sehingga analisis gender bermanfaat untuk memberi dasar dalam melakukan transformasi social untuk mewujudkan tata kehidupan baru yang lebih adil. Hal ini dirasa perlu karena masih kentalnya permasalahan gender yang terjadi dalam suatu masyarakat dikarenakan sistem sosial budaya yang masih menganut budaya patriarki dimana laki-laki masih dianggap lebih unggul dari perempuan karena faktor fisik yang lebih kuat, kemudian tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga masih berorientasi pada adat istiadat yang kuat seperti perempuan. Karena itu untuk merespon isu kesetaraan gender ini, maka pemerintah membuat Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman-pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki, dimana kita perlu memperjuangkan keseimbangan gender untuk kepentingan kedua gender, menegakkan keadilan bagi kedua

gender serta memberikan kesempatan pada kedua gender untuk berkembang sesuai dengan minat dan keahliannya secara proporsional.

Untuk program strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang yang mendukung pelaksanaan Analisa Gender yaitu :

- (1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.

- (2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.

- (3) Program Penyelenggaraan Jalan

Dalam upaya menanggulangi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pinrang, perlu dilakukan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). P3KE berupaya mencari referensi penetapan sasaran bagi program penghapusan kemiskinan ekstrem yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) adalah data yang berfungsi untuk menyasar individu/keluarga dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara nasional.

Untuk program strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang yang mendukung upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem serta penurunan stunting di Kabupaten Pinrang yaitu :

- (1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

- (2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

(3) Program Pengembangan Permukiman

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran rencana kerja jangka menengah pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang tahun 2026 meliputi indikator kinerja tujuan dan sasaran dengan target kinerja berdasarkan data pencapaian target kinerja tahun 2024 serta prediksi pencapaian target kinerja tahun 2025 serta didasarkan atas sasaran target kinerja Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang Tahun 2025-2029 sebagaimana pada Tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pinrang Tahun 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2026	KET
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, bangunan gedung, sanitasi dan air minum) yang terintegrasi, merata dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan sesuai dengan perencanaan tata ruang wilayah	Meningkatnya kualitas dan akses layanan air minum dan sanitasi secara merata	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi (%)	97.59 %	
			Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	98.87 %	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2026	KET
		Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas, terintegrasi, dan berkelanjutan guna mendukung konektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sesuai rencana tata ruang	Persentase Kemantapan Jalan (%)	71.75 (%)	
			Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (%)	59.49 (%)	
			Persentase bangunan gedung yang berfungsi (%)	0.22 (%)	
			Persentase kesesuaian penataan ruang (%)	100%	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	83 (A)	

Sumber : Renstra PD Dinas BIMACIPTA Kab. Pinrang 2025 – 2029

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Perumusan Program strategis DISBIMACIPTA pada penganggaran 2026 mengacu pada nomenklatur Permendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023. Penentuan pagu anggaran keselarasan dan konsistensi Rencana Strategis dengan mempertimbangkan hasil capaian kinerja DISBIMACIPTA tahun sebelumnya, arah kebijakan, target dan indikasi pagu RKPD, analisis kebutuhan dan prioritas, usulan masyarakat serta usulan pemangku kepentingan lainnya.

Perumusan ini disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. merupakan program-program yang secara langsung mendukung pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2025-2029. Program strategis yang sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta

Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang adalah program - program strategis yang mendukung **misi 1 “Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan berbasis mitigasi bencana”** dan **misi 4 “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas”** Bupati dan Wakil Bupati Pinrang masa jabatan tahun 2025-2029 yaitu :

- (1) Misi 1, meliputi program yaitu :
 - (a) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - (b) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
 - (c) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
 - (d) Program Pengembangan Permukiman;
 - (e) Program Penataan Bangunan Gedung;
 - (f) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
 - (g) Program Penyelenggaraan Jalan;
 - (h) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (2) Misi 4, meliputi program yaitu :
 - (a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pinrang terpilih tahun 2025-2029 memiliki 11 (sebelas) program prioritas dan terdapat 2 (dua) program prioritas sesuai tugas dan fungsi pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang pada **misi 1 dan misi 4** yaitu :

- (1) Program layanan yang PRIMA (Pelayanan Infrastruktur Maju dan Andal);
- (2) Program Desa Maju, Daerah terhubung;
- (3) Program tata kelola Pemerintahan dan Revolusi Mental

Berdasarkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Pinrang masa jabatan 2025-2029 diatas, maka strategi yang dapat dilakukan untuk pencapaian visi, misi dan program tersebut yang dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah ini:

Tabel 3.2
Strategi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Masa Jabatan Tahun 2025-2029

Pinrang Berkelanjutan, Inklusif, Maju dan Mandiri		
Misi 1 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan berbasis mitigasi bencana		
Tujuan	Sasaran	Strategi
1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan infrastruktur dasar (sanitasi, air minum, jalan, drainase, dan bangunan gedung) yang terintegrasi, merata, dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan sesuai dengan perencanaan tata ruang wilayah	1. Meningkatnya kualitas dan akses layanan air minum dan sanitasi secara merata	1. Penguatan Infrastruktur: (a) Penguatan <i>baseline</i> (data dasar) air minum dan sanitasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (b) Peningkatan penyusunan dan kualitas dokumen perencanaan teknis SPAM dan SPALD (c) Peningkatan dan optimalisasi infrastruktur SPAM dan SPALD terbangun (d) Perluasan Jaringan Perpipaan melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur jaringan perpipaan air minum terutama di daerah perkotaan dan perdesaan yang sulit dijangkau (e) Peningkatan pembangunan SPALD baik SPLDT maupun SPALDS yang layak di permukiman penduduk untuk pengelolaan limbah domestik yang lebih baik

Tujuan	Sasaran	Strategi
		2. Penguatan Pemberdayaan Kelembagaan/Stakeholders dan Pemberdayaan Masyarakat: (a) Penguatan kebijakan /peraturan terkait pengelolaan SPAM dan SPALD di daerah (b) Sinergitas penyediaan akses SPAM dan SPALD antar stakeholder terkait (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Bumdes, KSM dan masyarakat) (c) Sinergitas antar stakeholder terkait dan masyarakat serta kelembagaan masyarakat tentang kegiatan sosialisasi dan informasi air minum dan sanitasi layak dan aman bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat (d) Peningkatan pelaksanaan pemantauan dan pengujian sumber air bersih untuk memastikan air yang didistribusikan memenuhi standar baku mutu air minum serta memastikan air limbah yang telah dikelola aman untuk dibuang yang dilaksanakan secara rutin dan berkala (e) Peningkatan pelayanan L2T2 dan L2T3 kepada masyarakat secara digital oleh instansi terkait (f) Peningkatan pembinaan kualitas dan kompetensi SDM aparatur serta penguatan pengelola KSM air minum dan sanitasi

Tujuan	Sasaran	Strategi
	2. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas, terintegrasi, dan berkelanjutan guna mendukung konektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sesuai rencana tata ruang	1. Penguatan Infrastruktur: (a) Peningkatan kualitas pendataan leger jalan untuk penguatan perencanaan teknis jalan dan jembatan kabupaten (b) Penguatan dokumen perencanaan teknis masterplan drainase baik perkotaan maupun lingkungan serta outline kawasan rawan genangan (c) Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang Komprehensif (d) Penguatan dokumen-dokumen perencanaan teknis wilayah di Kabupaten Pinrang (e) Peningkatan kondisi jalan perkotaan yang terintegrasi dengan sistem drainase yang baik untuk mencegah banjir serta penyediaan trotoar dan bahu jalan (f) Peningkatan kualitas infrastruktur jalan/jembatan dan sistem drainase melalui pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan baik secara rutin maupun berkala untuk memastikan daya tahan, keamanan, dan efisiensi dalam jangka panjang serta memanfaatkan teknologi ramah lingkungan

Tujuan	Sasaran	Strategi
		2. Penguatan Pemberdayaan Kelembagaan/Stakeholders dan Pemberdayaan Masyarakat: (a) Meningkatkan pelayanan dan sosialisasi terkait permohonan PBG/SLF kepada masyarakat serta instansi (b) Meningkatkan pembinaan, pengaturan dan pengawasan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya (c) Penguatan kompetensi SDM aparatur di bidang jalan, drainase serta pembangunan gedung dan penataan ruang
Misi 4 :		
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas		
	3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1. (a) Meningkatkan kompetensi SDM aparatur dengan memanfaatkan teknologi digital informasi dan komunikasi (TIK) terkini dalam mendukung kinerja pelayanan publik

Sumber : Renstra PD Dinas BIMACIPTA Kab. Pinrang 2025 – 2029

Adapun jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada Tahun 2026 dengan total Pagu sebesar Rp 84.709.237.888,- adalah sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|------|
| 1. Jumlah Program | : 9 |
| 2. Jumlah Kegiatan | : 17 |
| 3. Jumlah Sub Kegiatan | : 71 |

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang Tahun 2026 dan Perkiraan Maju tahun 2027

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				84.709.237.888				88.509.242.066
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				84.709.237.888				88.509.242.066
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah(%)		97,89	12.349.200.208			98,87	12.237.549.833
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan dan dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu (%)		100	108.206.150			100	113.418.650
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	Kab. Pinrang, Paleteang, Semua Kel/Desa	2	15.950.000			2	20.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA - SKPD (Dokumen)	Kab. Pinrang, Paleteang, Semua Kel/Desa	1	12.757.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	13.395.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA - SKPD (Dokumen)	Kab. Pinrang, Paleteang, Semua Kel/Desa	2	18.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2	18.600.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA - SKPD (Dokumen)	Kab. Pinrang, Paleteang, Semua Kel/Desa	1	4.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	4.900.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA - SKPD (Dokumen)	Kab. Pinrang, Paleteang, Semua Kel/Desa	2	7.459.650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2	7.459.650
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Laporan)	Kab. Pinrang, Paleteang, Semua Kel/Desa	5	18.039.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5	18.039.00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (laporan)	Kab. Pinrang, Paleteang, Semua Kel/Desa	11	10.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11	11.025.000
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	1	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	10.000.000
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	1	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	10.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase serapan anggaran secara tepat waktu dan sesuai aturan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	100	8.024.515.005	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100	8.181.697.950

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	71	7.165.810.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		76	7.322.714.000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (Dokumen)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	12	400.005.255	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	400.100.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (Dokumen)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	12	425.097.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	425.100.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD (Laporan)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	1	10.617.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	10.800.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD (Laporan)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	12	22.983.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	22.983.950
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase capaian layanan pengelolaan administrasi barang milik daerah (%)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	100	13.218.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100	13.218.600
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD (Dokumen)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	4	3.218.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4	3.218.600
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD (Laporan)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	2	10.000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2	10.000.000
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase capaian layanan pengelolaan administrasi pendapatan daerah		100	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100	2.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	12	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	2.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase capaian layanan administrasi kepegawaian	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	100	225.835.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100	248.864.800
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya (Paket)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	2	50.0000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2	73.029.600
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dokumen)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	5	25.835.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2	25.835.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan (Orang)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	18	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		18	150.000.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi(%)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	100	325.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100	425.350.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	1	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	30.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Paket)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	1	20.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	20.600.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	4	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4	35.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan (Dokumen)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	12	44.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	44.600.000
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan (Paket)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	1	36.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	36.750.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	100	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100	250.000.000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD (dokumen)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	2	8.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2	8.400.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase capaian barang milik daerah yang diadakan sesuai analisis kebutuhan (%)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	100	447.339.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100	225.000.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	2	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	33.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	5	153.389.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5	155.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	1	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	0.00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	2	33.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2	37.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian jasa penunjang urusan kantori (%)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	100	1.298.000.033	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100	1.298.000.033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	12	198.000.033	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	198.000.033
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	12	1.100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	1.100.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian barang milik daerah penunjang urusan kantor yang terpelihara (%)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	100	1.904.735.920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100	1.730.000.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (Unit)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	105	1.281.815.920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		105	1.280.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	95	342.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		95	200.000.000
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	1	280.720.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	50.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	2	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2	200.000.00
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi (%)		89,03	2.178.000.000			89,44	3.740.000.000
		Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan (%)		8,56				8,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/kota	Persentase jumlah RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%) Persentase jumlah RT yang menggunakan pelayanan air minum yang dikelola secara aman, berlokasi di dalam atau di halaman rumah, dan air tersedia sepanjang tahun (%) Persentase rumah tangga dengan akses air minum aman jaringan perpipaan (%)		97,59 33,05 6,53	2.178.000.000			98,17 36,00 7,10	3.740.000.000
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) (Orang)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	50 (15 perempuan),(35 laki-laki)	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		400	65.000.000
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	Kab. Pinrang, Mattirobulu, Semua Kel/Desa	3,25	818.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3,25	1.100.000.000
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (liter/detik)	Kab. Pinrang, Mattirobulu, Semua Kel/Desa	3,00	550.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3,00	1.650.000.000
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani oleh perluasan sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan (SR)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	150 (45 perempuan),(105 Laki-laki)	825.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		200 (50 perempuan;150 laki-laki)	825.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Kinerja Pelayanan SPALD-S Akses Aman (%)		3,53	1.070.000.000			5,55	1.400.000.000
		Kinerja Pelayanan SPALD-T Akses Aman (%)		1,56				1,6	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)		98,87	1.070.000.000			98,99	1.400.000.000
		Persentase rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja (%)		5,09				7,15	
	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi (unit)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	1	900.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	0.00
	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah rumah tangga yang terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah tangga)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	150	70.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		150	60.000.000
	Penyediaan Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Buang Air Besar Individual dengan Kloset Leher Angsa dan Unit Pengolahan Setempat Anaerob (Yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan /sesuai SNI 2398)atau unit pengolahan setempat aerob	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	14	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		75	650.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)		59,49	5.100.800.000			66,36	2.886.000.000
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik (%)		41,00	5.100.800.000			36,00	2.886.000.000
		Persentase daerah yang tidak terjadi genangan > 2 kali setahun (%)		21,32				25,10	
	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah sistem drainase perkotaan yang direhabilitasi (Sistem drainase perkotaan)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	1	500.000.000			1	400.000.000
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah sistem drainase perkotaan yang dibangun (sistem drainase perkotaan)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	3	2.450.800.000			3	756.000.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan strategis yang terfasilitasi penyelenggaraan infrastruktur permukiman (%)		7,14	463.878.654			7,14	1.000.000.000
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis (%)		17,65	463.878.654			17,65	1.000.000.000
	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota (	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	82,23	463.878.654	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	0.00
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten/kota (Rasio)		1,00	1.100.000.000			1,00	1.100.000.000
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan (Rasio)		0,74	1.130.000.000			0,74	1.250.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/kota (dokumen)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	1	930.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	1.100.000.000
	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB) Tim Profesi Ahli (TPA) Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB) Tim Profesi Ahli (TPA) Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (persetujuan)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	150	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		150	150.000.000
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis kabupaten (Rasio)		0,033	404.050.000			0,033	800.000.000
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan dan lingkungannya yang tertata di daerah (%)		4	404.050.00			8	800.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase ketahanan jalan (%)		71,75	61.280.699.026			73,28	64.313.062.233
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk (rasio)		0,0015	61.280.699.026			0,0015	64.313.062.233
		Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 (%)		1,83				1,83	
		Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40km/jam) (%)		60,38				61,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah dokumen leger jalan yang dikelola (dokumen)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	1	231.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	230.000.000
	Penyusunan Rencana,Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen Rencana,Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yan disusun (Dokumen)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	1	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	150.000.000
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang dipelihara secara rutin(Km)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	5,7	3.275.010.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5,7	1.955.692.233
	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun (Km)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	9	34.085.520.976	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		9	43.067.370.000
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dipelihara secara berkala (Km)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	0,42	1.527.528.722	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0,82	1.550.000.000
	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (m)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	30	406.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30	410.000.000
	Rekonstruksi jalan	Panjang jalan yang direkonstruksi (Km)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	4,5	11.168.639.328	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4,5	14.500.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala (m)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	10	1.140.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5	800.000.000
	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun (m)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	28	9.347.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3	1.500.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang dalam RTRW (%)		100	732.610.000			100	882.630.000
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase kebijakan penataan ruang yang diterbitkan sesuai aturan (%)		0	300.000.000			10	100.000.000
	Pelaksanaan Persetujuan Subtansi RDTR Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/ Kota (dokumen)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	2	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2	100.000.000
	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Jumlah publikasi informasi penataan ruang (publikasi)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	1	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	50.000.000
	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (dokumen)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	2	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		-	0
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Laporan sosialisasi kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan bidang penataan ruang (laporan)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	1	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	50.000.000
	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebijakan penataan ruang yang disusun (%)		5	50.000.000			10	50.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Kompetensi SDM bidang Penataan Ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	2	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2	50.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara (Rasio)		0,2045	100.000.000			0,2045	120.000.000
	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah dokumen koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	2	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2	60.000.000
	Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan runag (Dokumen)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	1	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	60.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Ruang publik yang berubah peruntukannya (%)		0,00	282.610.000			0,00	312.630.000
	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang (kasus)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	4	49.980.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4	50.000.000
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (dokumen)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	2	132.630.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12	162.630.000
	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (dokumen)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	3	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3	50.000.000
	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang (laporan)	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	2	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2	50.000.000

BAB IV
Rencana Kerja dan Pendanaan
Perangkat Daerah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Penyusunan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang tahun 2026 dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Renstra Dinas yang mendukung prioritas pembangunan daerah dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Secara umum pendanaan kegiatan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pinrang bersumber dari DAU, DAK, PAD serta Hibah.

Adapun program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan pelayanan Dinas Bina Cipta Kabupaten Pinrang tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4. 1

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pinrang Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISA SI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TAR GET 2026	PAGU INDIKA TIF (Rp)	L OKA SI	SUMB ER DANA	PRIORIT AS			TA RGE T	PAGU INDIKA TIF (Rp)	
											NASION AL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG						84.709.2 37.888,0 0						88.509.242.066,0 0		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						84.709.2 37.888,0 0							88.509.2 42.066,0 0	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						84.709.2 37.888,0 0							8850924 2066,00	
1,	1,03,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	84.709.2 37.888,0 0						-	8850924 2066,00	
	1.03.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	108.206. 150,00			-	-	-	-	1134186 50,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.2 .01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah				2 Dokum en	15.950.0 00,00	Kab. Pinra ng, Sem ua Keca mata n, Sem ua	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	-	-	2 Doku men	20.000.0 00,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

									Kel/D esa							
	1.03.01.2 .01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokum en	12.757.5 00,00	Kab. Pinra ng, Palet eang , Lalen g Bata	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	-	-	1 Doku men	13.395.0 00,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.2 .01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				2 Dokum en	18.600.0 00,00	Kab. Pinra ng, Palet eang , Lalen g Bata	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	-	-	2 Doku men	18.600.0 00,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.2 .01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokum en	4.900.00 0,00	Kab. Pinra ng, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	-	-	1 Doku men	4.900.00 0,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.2 .01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi</i>				2 Dokum en	7.459.65 0,00	Kab. Pinra ng, Palet eang , Lalen	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	-	-	2 Doku men	7.459.65 0,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

			<i>Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>						g Bata							
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				5 Laporan	18.039.000,00	Kab. Pinrang, Paletang, Lalleng Bata	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	5 Laporan	18.039.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				11 Laporan	10.500.000,00	Kab. Pinrang, Paletang, Lalleng Bata	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	11 Laporan	11.025.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Pinrang, Semau Kecamatan, Semau Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang	-	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

												akun- ta- bel dan inovati- f				
	1.03.01.2 .01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			<i>Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah</i>				1 Data	10.000.000,00	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Data	10.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	8.024.515.005,00			-	-	-	-	8.181.697.980,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.2 .02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				71 Orang/bulan	7.165.810.850,00	Kab. Pinrang, Paletang, Lalong Bata	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	76 Orang/bulan	7.322.714.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.2 .02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan</i>				12 Dokumen	400.005.255,00	Kab. Pinrang, Paletang,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	12 Dokumen	400.100.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

			Tugas ASN						Lalen g Bata							
	1.03.01.2 .02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	425.097.200,00	Kab. Pinrang, Palet eang , Lalen g Bata	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	12 Dokumen	425.100.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.2 .02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	10.617.750,00	Kab. Pinrang, Palet eang , Lalen g Bata	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	1 Laporan	10.800.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.2 .02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	22.983.950,00	Kab. Pinrang, Palet eang , Lalen g Bata	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	12 Laporan	22.983.950,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	13.218.600,00			-	-	-	-	13.218.600,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				4 Dokumen	3.218.600,00	Kab. Pinrang, Palet eang, Lalen g Bata	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	4 Dokumen	3.218.600,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Pinrang, Palet eang, Lalen g Bata	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	2 Laporan	10.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.000.000,00			-	-	-	-	2.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>				12 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Pinrang, Palet eang, Lalen g Bata	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	12 Dokumen	2.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	225.835.000,00			-	-	-	-	248.864.600,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta</i>				2 Paket	50.000.000,00	Kab. Pinrang, Palet eang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	2 Paket	73.029.600,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

			Disediakan						g Bata							
	1.03.01.2 .06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	35.000.000,00	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	3 Paket	35.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.2 .06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				12 Dokumen	44.600.000,00	Kab. Pinrang, Paletang, Lalong Bata	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	12 Dokumen	44.600.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.2 .06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	36.750.000,00	Kab. Pinrang, Paletang, Lalong Bata	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	1 Paket	36.750.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.2 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				110 Laporan	150.000.000,00	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	100 Laporan	250.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

									Kel/D esa							
	1.03.01.2 .06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah an Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokum en	8.400.00 0,00	Kab. Pinra ng, Palet eang , Sem ua Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	-	-	1 Doku men	8.400.00 0,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.2 .07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	447.339. 500,00			-	-	-	-	225.000. 000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.2 .07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				2 Unit	60.000.0 00,00	Kab. Pinra ng, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	-	-	1 Unit	30.000.0 00,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.2 .07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				5 Unit	153.389. 500,00	Kab. Pinra ng, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	-	-	5 Unit	155.000. 000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.2 .07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	0,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	33.950.000,00	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	2 Unit	37.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.298.000.033,00			-	-	-	-	1.298.000.033,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	198.000.033,00	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	12 Laporan	198.000.033,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum</i>				12 Laporan	1.100.000.000,00	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	12 Laporan	1.100.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

			Kantor yang Disediakan						mata n, Sem ua Kel/D esa							
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.904.735.920,00			-	-	-	-	1.730.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				36 Unit	1.281.815.920,00	Kab. Pinrang, Sem ua Kecamatan, Sem ua Kel/D esa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	36 Unit	1.280.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				95 Unit	342.000.000,00	Kab. Pinrang, Sem ua Kecamatan, Sem ua Kel/D esa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	95 Unit	200.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi				4 Unit	280.720.000,00	Kab. Pinrang, Sem ua Kecamatan, Sem ua Kel/D esa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	4 Unit	50.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

	1.03.01.2 .09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi</i>				2 Unit	200.000.000,00	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	2 Unit	200.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
2,	1,03,03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	-			-	2.178.000.000,00			-	-	-	-	3.740.000.000,00	
	1.03.03.2 .01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.178.000.000,00			-	-	-	-	3.740.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.03.2 .01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			<i>Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</i>				50 Orang	50.000.000,00	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	50 Orang	65.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.03.2 .01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			<i>Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan</i>				3.25 Liter/Detik	818.000.000,00	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	3.25 Liter/Detik	1.100.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

									Kel/D esa							
	1.03.03.2 .01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			<i>Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun</i>				3 Liter/De tik	1.650.00 0.000,00	Kab. Pinra ng, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	2. Pening ka tan Pemb a nguna n infrastr uktur yang berkua litas dan merata	-	3 Liter/ Detik	1.650.00 0.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.03.2 .01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			<i>Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan</i>				250 SR	760.000. 000,00	Kab. Pinra ng, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	-	-	250 SR	880.000. 000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
3,	1,03,05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	-			-	1.070.00 0.000,00						-	1.400.00 0.000,00	
	1.03.05.2 .01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.070.00 0.000,00			-	-	-	-	1.400.00 0.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.05.2 .01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)														
			<i>Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang</i>				1 Unit	900.000. 000,00	Kab. Pinra ng, Sem ua	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

			<i>di optimalisasi</i>						Kecamatan, Semua Kel/Desa							
	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja														
			<i>Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja</i>				150 Rumah Tangga	70.000.000,00	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	150 Rumah Tangga	60.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.05.2.01.0044	Penyediaan Unit Pengolahan Setempat														
			<i>Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Buang Air Besar Individual dengan Kloset Leher Angsa dan Unit Pengolahan Setempat Anaerob (Yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan /sesuai SNI 2398)atau unit pengolahan setempat aerob</i>				4 Unit	50.000.000,00	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	75 Unit	650.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

4,	1,03,06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-	-			-	5.100.80 0.000,00						-	2.886.00 0.000,00	
	1.03.06.2 .01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	5.100.80 0.000,00			-	-	-	-	2.886.00 0.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.06.2 .01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan														
			<i>Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun</i>				1000 M	2.150.00 0.000,00	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	1400 m	1.500.00 0.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.06.2 .01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan														
			<i>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi</i>				1 Sistem Drainase Perkotaan	500.000. 000,00	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	1 Sistem Drainase Perkotaan	400.000. 000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.06.2 .01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan														
			<i>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun</i>				3 Sistem Drainase Perkotaan	2.450.80 0.000,00	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	3 Sistem Drainase Perkotaan	756.000. 000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

									Kel/D esa							
5,	1,03,07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	-	-			-	463.878.654,00						-	1.000.000.000,00	
	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	463.878.654,00			-	-	-	-	1.000.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.07.2.01.0015	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota														
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota				1 UNIT	463.878.654,00	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	0,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
6,	1,03,08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-	-			-	1.130.000.000,00						-	1.400.000.000,00	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-			-	1.130.000.000,00			-	-	-	-	1.400.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran				1 Dokumen	930.000.000,00	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	1 Dokumen	1.100.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

			Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						Kel/Desa							
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				150 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	150 Dokumen	150.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
7,	1,03,09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-	-			-	404.050.000,00			-	-	-	-	800.000.000,00	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	404.050.000,00			-	-	-	-	800.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

	1.03.09.2 .01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/K ota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan</i>				1 Kawasa n	404.050. 000,00	Kab. Pinra ng, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	-	-	1 Kawa san	800.000. 000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
8,	1,03,10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-			-	61.280.6 99.026,0 0						-	64.313.0 62.233,0 0	
	1.03.10.2 .01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	61.280.6 99.026,0 0			-	-	-	-	61.280.6 99.026,0 0	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.10.2 .01.0028	Pengelolaan Leger Jalan														
			<i>Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola</i>				1 Dokum en	231.000. 000,00	Kab. Pinra ng, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	-	-	1 Doku men	230.000. 000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.10.2 .01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengemban gan Jaringan Jalan serta Perencanaa n Teknis Penyelengga raan Jalan dan</i>				1 Dokum en	100.000. 000,00	Kab. Pinra ng, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	-	-	1 Doku men	150.000. 000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

			<i>Jembatan yang Disusun</i>													
	1.03.10.2 .01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			<i>Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin</i>				5,7 KM	3.275.01 0.000,00	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	5,7 KM	1.955.69 2.233,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.10.2 .01.0053	Pembangunan Jalan														
			<i>Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan</i>				9 KM	34.085.5 20.976,00	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	9 KM	43.067.3 70.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.10.2 .01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan														
			<i>Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala</i>				0,42 KM	1.527.52 8.722,00	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	0,42 KM	1.550.00 0.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.10.2 .01.0058	Rehabilitasi Jembatan														

			<i>Panjang Jembatan yang Direhabilitasi</i>				30 Meter	406.000.000,00	Kab. Pinrang, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	30 Meter	410.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan														
			<i>Panjang Jalan yang Direkonstruksi</i>				4.5 KM	11.168.639.328,00	Kab. Pinrang, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	4.5 KM	14.500.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0061	Pemeliharaan Berkala Jembatan														
			<i>Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala</i>				10 Meter	1.140.000.000,00	Kab. Pinrang, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	10 Meter	800.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan														
			<i>Panjang jembatan yang dibangun</i>				28 Meter	9.347.000.000,00	Kab. Pinrang, Kecamatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	28 Meter	1.500.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

									Kel/D esa							
9,	1,03,12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-	-			-	732.610. 000,00					-		882.630. 000,00	
	1.03.12.2 .01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-	-			-	300.000. 000,00			-	7.Peni ngkat an layana n transp ortasi (darat, laut, udara) dan infrastr uktur , invest asi padat karya dan berwa wasan lingku ngan	-	-	100.000. 000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.12.2 .01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/K ota</i>				2 Dokum en	100.000. 000,00	Kab. Pinra ng, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	7.Peni ngkat an layana n transp ortasi (darat, laut, udara) dan infrastr uktur , invest asi padat karya dan	-	-	0,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

												berwasan lingku ngan				
	1.03.12.2 .01.0007	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang														
			<i>Jumlah publikasi informasi penataan ruang</i>				1 Publika si	50.000.0 00,00	Kab. Pinra ng, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	-	-	1 Publik asi	50.000.0 00,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.12.2 .01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/K ota</i>				2 Dokum en	100.000. 000,00	Kab. Pinra ng, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	-	-	-	0,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.12.2 .01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang														
			<i>Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang- undangan bidang</i>				1 Laporan	50.000.0 00,00	Kab. Pinra ng, Sem ua Keca mata n, Sem	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	-	-	1 Lapor an	50.000.0 00,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

			<i>penataan ruang.</i>						ua Kel/D esa							
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	350.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.02.0006	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang														
			<i>Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan</i>				2 Orang	50.000.000,00	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/D esa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	2 Orang	50.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	120.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang														
			<i>Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang</i>				2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/D esa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	2 Dokumen	60.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang														
			<i>Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang</i>				1 Sistem Informasi	50.000.000,00	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	1 Sistem Informasi	60.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

									ua Kel/D esa							
	1.03.12.2 .04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	282.610.000,00			-	-	-	-	312.630.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.12.2 .04.0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang														
			<i>Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang</i>				4 Kasus	49.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Semua Desa Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	4 Kasus	50.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.12.2 .04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang														
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang</i>				2 Dokumen	132.630.000,00	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	2 Dokumen	162.630.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

	1.03.12.2 .04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK														
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				3 Dokumen	50.000.0 00,00	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	3 Dokumen	50.000.0 00,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	1.03.12.2 .04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang				2 Laporan	50.000.0 00,00	Kab. Pinrang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	2 Laporan	50.000.0 00,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	J U M L A H							84.709.2 42.066,0 0							88.509.2 42.066,0 0	

BAB V

Penutup

BAB V

P E N U T U P

5.1 Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian

Dari uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pinrang Tahun 2026 merupakan pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan program dan kegiatan untuk tahun yang akan datang. Keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas diperlukan dukungan berupa komitmen dari kepemimpinan yang cakap, berkualitas dan demokratis serta adanya partisipasi dari masyarakat secara aktif;
2. Rencana Kerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang merupakan rencana tahunan yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang. Selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan selama setahun, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang. Sehingga diharapkan dalam pelaksanaan tugas lebih terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat mudah, cepat, transparan dan akuntabel.

5.2 Kaidah – kaidah Pelaksanaan

Kesepakatan dan penetapan dokumen perencanaan berupa RENJA-PD, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

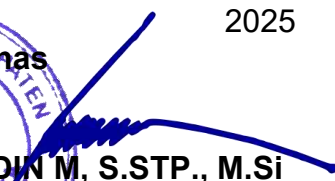
1. Rencana kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh

Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

2. Renja-PD ini sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan, sekaligus sebagai bahan evaluasi kinerja PD;
3. Renja-PD akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya guna penyesuaian dengan RKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2026 apabila terdapat revisi sebagai akibat penyesuaian dengan hasil evaluasi.
4. Kualitas penyusunan Rencana Kerja akan sangat menentukan kualitas pelayanan Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pinrang yang diberikan kepada masyarakat yang memanfaatkan fasilitas tersebut.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya RKPD Tahun 2026, selanjutnya Renja Tahun 2026 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang merupakan acuan bagi sekretariat dan seluruh bidang yang ada di lingkungan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya.

Pinrang, 2025
Kepala Dinas

AWALUDDIN M. S.STP., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19800701 200012 1 001

